PENDIDIKAN POLITIK OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH II PARTAI GOLKAR MUBA PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Muhammad Hafizd NIM: 1657020077

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBUNG

Kepada Yth.

Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu politik, UIN Raden Fatah di-Palembang.,

Setelah melakukan bimbingan denga sunguh-sunguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Hafizd, Nim 1657020077 yang berjudul " Pendidikan Politik Oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Soial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, 5 Februari 2020

Pembimbing I

Ainur ropik M.Si

NIP. 197906192007101005

Pembimbing II

Hatta Azzuhri M.S,i

NIDN. 2016028804

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama

: Muhammad Hafizd

NIM Program Studi : 1657020077 : Ilmu Politik

Judul Skripsi

: Pendidikan Politik Oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai

Golkar Muba Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal

:Rabu / 26 Februari 2020

Tempat

: Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Politik.

Palembang,9 Maret 2020

DEKAN.

AN AGAA Izomiddin, M.A. 96206201988031991

TIM PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Ahmad Syukri, M.Si

NIP. 197705252005011014

Afif Musthofa Kawwami, M. Sos

NIDN. 2027029302

PENGUJI I

PENGUJI II

. Kun Budianto, M.Si

NIP. 19762072007011010

RENI APRIANI M.Si

NIDN, 2021049401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Muhammad Hafizd

Nim

: 1657020077

Jurusan

: Ilmu Politik

Judul Skripsi

: Pendidikan Politik Oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai

Golkar Muba Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

Menyatakan sesunguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interprestasi pembahasan dan kesimpulan yang di sajikan dalam skripsi ini kecuali yang di sebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolahan serta pemikiran saya dengan pengerahan pembimbing yang telah di tetapkan.

2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN raden fatah palembang maupun perguruan tinggi lainya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 9 Maret 2020

B06AEF020816

Nim. 165702007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"karena sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (QS.Asy Syarh: 5-6)

Kupersembahkan kepada:

- . Kedua Orang Tua
- . Saudara-Saudari ku
- . Sahabat Seperjuangan
- . Teman Special
- . Teman-Teman Ilmu Politik 1602C
- . Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai pendidikan politik yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba dalam melakukan pendidikan politik pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Tahun 2019. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar. Data ini diolah menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Herman Giescake, dalam teori terdapat 4 pengertian mengenai pendidikan politik diantaranya; 1. Bildungwissen 2. Orientierungwissen 3. Verhaltungsweisen 4. Aktionwissen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba ialah setiap pelaksanaan selalu melibatkan tokoh masyarakat, dan melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Dialog Initeraktif, Pendidikan Politik dilakukan dengan mengarahkan masyarakat pada norma hukum melalui kegiatan Road Show dan Diklat, materi yang disampaikan berdasarkan dengan isu-isu yang berkenaan dengan Pancasila dan Udang-Undang Dasar 1945 yang tersusun dengan baik dalam bentuk Modul. Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan pendidikan politik yaitu Sebagian masyarakat yang masih memiliki sifat apatis dan Biaya atau Anggaran.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partai Politik.

ABSTRACT

This research is about political education carried out by the Regional Leadership Council II of the Golkar Muba Party in the Sekayu District Society in 2019. This study aims to find out how political education is carried out by the Regional Leadership Council II of the Golkar Muba Party and to know the factors that are inhibiting the Council Regional Leadership II of the Golkar Muba Party in conducting political education in the Sekayu District Society in 2019. The research data was collected through direct interviews with several informants, namely Members of the Regional Leadership Board II of the Golkar Party. This data is processed using data collection, data reduction, data presentation, and inference. The theory used in this research is Herman Giescake's theory, in theory there are 4 about political education including; 1. Bildungwissen notions Orientierungwissen 3. Verhaltungsweisen 4. Aktionwissen. The results of this study indicate that political education carried out by the Regional Leadership Council II of the Golkar Muba Party is that every implementation always involves community leaders, and approaches with the community through Initeractive Dialogue activities, Political Education is done by directing the community to legal norms through the Road Show and Training, the material presented is based on issues relating to Pancasila and the 1945 Constitution which are well arranged in the form of Modules. The inhibiting factors in carrying out political education are the majority of people who still have apathetic nature and the cost or budget.

Keywords: Political Education, Political Parties.

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUUAN PEMBIMBING	.i
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWAi	ii
SURAT PERYATAANi	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHANi	iv
ABSTRAK	V
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	X
KATA PENGANTAR	хi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penulisan	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	19
G. Metodologi Penelitian	27
1. Metode Penelitian	27
2 Data Dan Sumber Data	28

3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Lokasi Penelitian	30
5. Teknik Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II	35
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Sejarah Partai Golkar	35
B. Visi Partai Golkar	39
C. Misi Partai Golkar	40
D. Tujuan dan Fungsi Partai Golkar	41
E. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi Partai	42
F. Lambang Partai Golkar	46
G. Gambaran Umum Dpd II Partai Golkar Muba	47
BAB III	52
HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Pendidikan Politik Oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai	Golkar Muba
Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Bang	yuasin Tahun
2019	52
B. Faktor Penghambat Pendidikan Politik Oleh Dewan Pimp	oinan Daerah II
Partai Golkar Muba Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu I	
·	-
Banyuasin Tahun 2019	77
BAB IV	83
PENUTUP	83
A Vogimundon	92

B. Saran	84	
DAFTAR PUSTAKA	86	
LAMPIRAN I	90	
LAMPIRAN II	92	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Jumlah Suara DPRD Kabupaten Muba	6
Tabel 1.2 Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg Wilayah Sekayu	7
Tabel 1.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan	9
Tabel 2.1 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba	49
Tabel 3.1 Biaya Kegiatan Pendidikan Politik	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Lambang Partai Golkar	. 46
Gambar. 3.1 Kegiatan Dialog Interaktif DPD II Partai Golkar Muba	. 61
Gambar. 3.2 Kegiatan Road Show DPD II Partai Golkar Muba	. 63
Gambar. 3.3 Undangan Kegiatan Road Show DPD II Partai Golkar Muba	. 65
Gambar. 3.4 Diklat DPD II Partai Golkar Muba	. 67

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul, "Pendidikan Politik Oleh DPD II Partai Golkar Muba Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019".

Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

- Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
- 3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
- 4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Sekaligus sebagai pembimbing I Penulis,
- Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
- 6. Dr. Ahmad Sukri M.Si,. sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
- 7. Afif Mustofa Kawwami M,Sos sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP

UIN Raden Fatah Palembang.

8. Hatta Azzuhri, M.Si. sebagai Dosen pembimbing II penulis.

9. Seluruh Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

10. Kader-kader DPD II Partai Golkar Muba;

11. Orang tua, Saudara dan Keluarga yang selalu mendoakan, menyemangati

dan selalu mendukung penulis;

12. Para informan yang telah membantumelengkapi hasil penulis;

13. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini

yang tidap dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam

penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,.

Palembang, 10 Februari 2020

Penulis,

Muhammad Hafizd

NIM 1657020077

xii

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi pertama kali muncul di yunani pada abad ke 5 SM (sebelum masehi), demokrasi diciptakan dengan tujuan untuk mengentikan sistem monarki pada saat itu yang dianggap tidak mampu lagi untuk mensejahterahkan rakyat yunani. Setelah muncul sejak lama demokrasi yang ada pada abad 16 mengalami perkembangan yang cukup baik, demokrasi modern yang muncul sejak abad ke 16 M. Ide demokrasi yang merupakan respon terhadap teokrasi dan monarki absolut ini berasal dari gagasan tentang konstitusi negara, liberalisme, pemisahan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta gagasan tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial negara dengan berkembangnya teori politik pada masa sekarang definisi demokrasi pun mengalami perkembangan pula.

Gagasan ide dasar dari demokrasi adalah yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat, dalam pengertian yang lebih jelas demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan yang berupa dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Maksudnya adalah kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan sebab itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan suatu kenegaraan, pada dasarnya keseluruhan sistem penyelenggaraanya suatu negara itu di peruntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan suatu negara yang baik

diidealkan untuk menyelenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti harus melibatkan masyarakat dalam menjalankan kepemerintahanya. ¹

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didalamnya menginginkan suatu kesetaraan tentang hak-hak berpolitik yang harus direalisasikan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan demokrasi,hal yang diperlukan yaitu peranan politik untuk membentuk sikap demokrasi di kalangan warga negara yang bertujuan untuk menciptakan suatu kreativitas warga negara terhadap politik, perubahan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai moral.²

Demokrasi memberikan suatu pemahaman, bahwa ada "sebuah bentuk kekuasaan dari rakyat". Dengan bentuk pemahaman seperti itu, rakyat akan menciptakan sebuah aturan yang tidak merugikan dirinya dan melindungi hakhaknya sebagai warga negara. Supaya hal itu dapat terlaksana, diperlukannya sebuah aturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak waraga negara, peraturan seperti itu biasa disebut dengan Konstitusi. ³

Tingkat pertumbuhan suatu negara dapat didasari pada masyarakat yang dapat mengerti dan memahami tentang tatanan pengelolaan suatu sistem pemerintahan, selain itu tingkat pendidikan juga menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan suatu negara karena dengan adanya tingkat pendidikan maka akan

2

¹Jimly Asshiddqie, *Hukum Tatanegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakatrta:Konstitusi Perss, 2005), Hal 241

²David Held. *Demokrasi & Tatanan Global : Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolititan*, (Yogyakarta ; pustaka pelajar, 2004), h. 125

³Jimly Asshidiqi, *Op,Cit.*, h. 246

dapat dengan mudah menanamkan sistem demokrasi, sangat berkepentingan dengan pendidikan seluruh warga negaranya untuk menanamkan norma-norma demokrasi dan ikut bertanggung jawab atas diterapkannya asas demokrasi, serta ikut dalam berpatisipasidalam pelaksanaan pemerintahan⁴

Sistem demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan suatu kebijakan secara rutin hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Partai politik memiliki tugas untuk menyalurkan dan menata aspirasi rakyat untuk dapat dijadikan *Public Opinion* yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan atau kebijakan yang tersusun.

Suatu negara yang modern dengan jumlah pemilih yang sangat besar kemudian mempunyai kepentingan yang bervariasi sehingga perlu pengelolan untuk dapat menjadi suatu keputusan atau kebijakan. Dengan ini peran partai politik sangatlah besar dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi suatu kebijakan. Maka dari itu, partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebenarya menentukan demokrasi. Oleh karena itu partai politik sebagai pilar dalam sistem politik yang demokratis.⁵

Partai Politik adalah ciri utama bagi sistem politik yang demokratis. Sedangkan salah satu fungsi dari Partai Politik yaitu pendidikan politik, hal ini

⁴Payerli Pasaribu. (2017). *Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*, Jurnal Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma, Vol. 5, No. 1, Hal. 52

⁵Jimly Asshidiqie. (2006). Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 4, Hal 7

yang sangat penting harus diperhatikan oleh partai politik mengingat tidak sedikit masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang politik politik masih sangat minim atau rendah. Partai politik mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik seharusnya tidak hanya memperhatikan masyarakat pada saat kampanye atau hanya menjelang pesta demokrasi. Akan tetapi kegiatan pendidikan politik ini harus juga berlangsung secara terus-menerus. Partai politik harus menciptakan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara masayarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita—cita suatu bangsa.

Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Politik merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan tidak hanya untuk kader partai saja namun juga untuk masyarakat umum, agar dapat meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif suatu masyarakat dalam pemilihan umum mapun kegiatan kepemerintahan. Pendidikan politik diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 11 angka (1) huruf (a) Tentang Partai Politik, dimana partai politik diwajibkan untuk mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan melakukan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat luas.

Undang-Undang di atas menegasakan pentingnya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan serta kesetaraan gender yang ditujukan dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban, sebagai warga negara partisipasi warga terhadap politik dan inisiatif warga Negara terhadap politik, serta mampu meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Pasal 13 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, juga diatur mengenai tentang pendidikan politik yaitu kewajiban

suatu partai politik melakukan pendidikan politik dan menyampaikan aspirasi politik bagi anggotanya di daerah manapun.

Partai Golkar merupakan salah satu partai yang ada di wilayah kabupaten Musi Banyuasin, Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Golkar in lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. GOLKAR ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama GOLKAR adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965. Jumlah anggota GOLKAR ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional GOLKAR adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.6

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi peneliti dalam memilih Partai Golkar sebagai objek penelitian tidak hanya perteimbangan mengenai karena partai golkar berada di wilayah kecamatan sekayu melainkan ada beberapa pertimbangan lain antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1

_

 $^{^6 \}rm Sejarah$ Partai Golkar Https://Partaigolkar.Or.Id/Sejarah Diakses Pada Tanggal $\,13$ September 2019

Hasil Perolehan Jumlah Suara DPRD Provinsi Kabupaten Musi Banyuasin

No	Partai politik	Periode pemilu		
		2014	2019	
1	Nasdem	10.149	12.520	
2	PKB	8.875	18.266	
3	PKS	5.221	26.552	
4	PDIP	23.399	58.870	
5	Golkar	11.250	62.271	
6	Gerindra	15.499	41.003	
7	Demokrat	7.608	14.434	
8	PAN	28.365	34.761	
9	PPP	5.456	7.457	
10	Hanura	5.663	19.909	
11	PBB	4.489	2.357	
12	PKB	1.834	-	

Sumber: Muba Online,2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang mengalami peningkatan jumlah suara pada pemilihan DPRD Provinsi. Dimana pada pemilu 2014 Partai Golkar memperoleh jumlah suara yang sangat signifikan dalam pemilihan DPRD Provinsi yaitu sebesar 11.250. Pada pemilu tahun 2019 Partai Golkar mendapatkan suara dengan jumlah 62.271.

Selain itu Partai Golkar merupakan salah satu partai yang memperoleh jumlah kursi yang paling banyak yaitu 7 kursi caleg pada Pemilu 2019 sebagai anggota DPRD Musi Banyuasin Periode 2019-2024. Antara lain pada Dapil 1. Berjumblah 2 Kursi, Dapil 2. 1 Kursi. Dapil 3. 3 Kursi Dan Dapil 4. 1 Kursi⁷. Hal lain yang melatar belakangi peneliti memilih partai Golkar yaitu diithat dari tabel berikut:

Tabel 1.2

⁷Https://Www.Prioritas.Co.Id

Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon Caleg Wilayah Kecamatan Sekayu

No	Partai Politik	Perolehan Suara		
		DPR	DPRD	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.358	1.419	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.836	4.779	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.307	5.410	
4	Partai Golongan Karya	11.174	8.946	
5	Partai Nasdem	1.198	1.935	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	288	211	
7	Partai Berkarya	2.065	1.572	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.263	3.660	
9	Partai Persatuan Indonesia	1.332	2.222	
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.705	1.172	
11	Partai Solidaritas Indonesia	475	403	
12	Partai Amanat Nasional	4.303	4.841	
13	Partai Hati Nurani Nasional	541	1.297	
14	Partai Demokrat	2.735	3.102	
15	Partai Bulan Bintang	297	716	
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	113	65	

Sumber: KPU Muba ,2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita simpulkan bahwa Partai Golkar di wilayah sekayu memperoleh suara lebih unggul di bandingkan dengan partai-partai lainnya, keunggulan jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Golkar tersebut tidak terlepas dari kemampuan partai dalam meningkatkan kualitas partai itu sendiri. Dalam meningkatkan kualitasnya partai golkar melakukan beberapa hal salah satunya ialah

perubahan anggota partai. Perubahan anggota ini bertujuan agar dapat menciptakan kader-kader yang berkualitas dan diharapkan dapat membuat perubahan yang baik bagi partai maupun bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Khususnya masyarakat di kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin⁸

Kader-kader partai dapat memberikan pengarahan tantang pendidikan politik dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami tentang kesadaran politik, kesadaran politik ini seperti pentingnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Berdasarkan kenyataanya sebagian masyarakat kabupaten Musi Banyuasin tepatnya di kota Sekayu itu sendiri menyangkut pendididkan politik dapat dikatakan kurang baik karena pamahaman tentang politik yang masih kurang, masyarakat tersebut belum memiliki kesadaran politik sehingga masyarakat masih kebingungan dengan apa yang harus lakukan pada saat akan diselenggarakannya Pemilihan Umum seperti pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur maupun Bupati.

Sekayu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Sumatra Selatan, sekaligus pusat pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana kecamatan Sekayu memiliki 14 Desa yaitu Bailangu, Baiilangu Timur, Balai Agung, Bandar Jaya, Kayuara, Lumpatan, Muara Teladan, Rimba Ukur, Serasan Jaya, Soak Baru, Sukarami, Sungai Batang dan Sungai Medak. Kabupaten Musi Banyuasin ini juga memiliki jumlah daftar pemilihan tetap (DPT) yang relatif banyak seperti tabel berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Dafftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

⁸Https:// Www.Sripoku.Com

Pemilihan Umum Oleh Kpu/Kpu Kabupaten/Kota

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah		
		Desa	Tps	L	P	L+P
1	Babat Supat	16	114	12.559	12.459	25.018
2	Babat Toman	13	98	11.552	11.325	22.877
3	Batang Hari	16	79	8.346	7.734	16.080
	Leko					
4	Bayung Lencir	23	240	29.583	27.022	56.605
5	Keluang	14	89	11.490	11.220	22.710
6	Lais	15	181	21.629	21.412	43.041
7	Lalan	27	125	15.464	14.218	29.682
8	Lawang Wetan	15	83	9.710	9.535	19.245
9	Plakat Tinggi	15	86	9.323	9.003	18.326
10	Sanga Desa	19	104	12.434	12.167	24.601
11	Sekayu	14	243	28.771	28.809	57.580
12	Sungai Keruh	22	129	15.778	15.264	31.042
13	Sungai Lilin	15	157	20.635	19.911	40.546
14	Tungkal Jaya	16	134	18.175	17.045	35.220
	Jumlah	240	1.862	225.449	217.124	442.573

Sumber: KPU Muba,2018

Berdasarkan tabel 1.3 dapat di jelaskan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kecamatan sekayu memiliki jumlah yang paling banyak di antara kecamatan lain yaitu sebesar 57.580 maka dari itu, Partai Politik memiliki peluang untuk mendapatkan jumlah suara yang lebih tinggi, sehingga dapat merealisasikan program politik secara optimal kususnya Partai Golkar.⁹

Banyaknya isu-isu negatif yang saling menjatuhkan lawan satu sama lain, yang mengakibatkan masyarakat menjadi terpecah karena perbedaan pendapat atau pilihan. Seperti isu SARA dan politik uang (*money pilitic*) tidak menutup kemungkinan kasus ini pernah terjadi walaupun tidak sampai ketahuan oleh panitia pengawas pemilihan umum, hal ini terjadi karena adanya rasa ketidak pedulian dari

⁹ Raka *Jumlah Dpt Hasil Perbaikan Pemilu 2019 Yang Ditetapkan Kpu Muba*, <u>Https://Mubaonline.Com</u>, Diakses Tanggal 13 September 2019

masyarakat yang kurang paham terhadap regulasi politik. Adanya pelanggaran oleh partai politik itu sendiri mengakibat masyarakat menjadi korban politik karena calon yang mereka pilih dalam pemilihan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Keadaan seperti ini mengakibatkan ketidakefisiensinya dan tidak berfungsinya pendidikan politik yang diberikan sehingga yang didapatkan masyrakat hanya janji-janji politik yang tidak berarti dan identik dengan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Peristiwa seperti ini menjadikan tamparan keras bagi partai politik dimana salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat menjadi cerdas dalam berpolitik bukan malah sebaliknya, pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik memiliki tujuan agar warga negaranya mampu berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian agar mampu berperilaku dengan baik, dapat menerima perbedaan pendapat dan sadar akan hak kewajibanya terhadap tanggung jawab ia sebagai warga negara untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu pendidikan politik bagi masyarakat sangatlah penting untuk terciptanya stabilitas nasional.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "PENDIDIKAN POLITIK OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH II PARTAI GOLKAR MUBA PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019"

B. Rumusan Masalah

¹⁰Https:// Www.Muba Online.Com

- Bagaimana pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan
 Daerah II Partai Golkar MUBA pada masyarakat Kecamatan Sekayu
 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019?
- 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar MUBA pada masyarakat kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana pendidikan politik yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar pada masyarakat Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.
- Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar dalam melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dan juga dapat menjadikan referensi yang nantinya mampu memberikan suatu perbandingan dalam melakukan penelitian pada masa yang akan datang tentang pendidikan politik yang telah dilakukan oleh Partai Politik khususnya Partai Golkar.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman hukum kepada Partai Politik khususnya dalam memberikan program pendidikan politik pada masyarakat yang menunjukkan prioritas dari partai politik agar dapat dijalankan semaksimal mungkin dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai (Pendidikan Politik Oleh DPD II Partai Golkar Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin) telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian dari. Arifin Nasution, dengan judul Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan. 11 Penelitian ini menggambarkan peran partai politik untuk mengembangkan konsep nasionalisme di Indonesia. Peran ini berkaitan dengan undang-undang tentang partai politik (UU Partai Politik No. 31 tahun 2003). Dalam undang-undang ini ada aturan tentang pendidikan politik bagi masyarakat. Studi ini menemukan bahwa peran partai politik sangat strategis untuk mempromosikan konsep nasionalisme. Namun sayangnya ada kesenjangan antara perencanaan dan implementasi wawasan pendidikan dalam hal kebangsaan dan tema pesta.

¹¹Muhammad Arifin Nasution. (2012). Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik Dan Wawasan Kebangsaan, Jurnal Politeia, Vol.4, No.1 h. 35-40

Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Pertama, partai politik tidak memiliki sumber keuangan yang besar. Kedua, sumber daya manusia yang ada kurang memiliki kesadaran politik. Ketiga, partai politik peduli dengan kekuasaan. Divergensi kepentingan antara partai politik (sebagai lembaga politik) dan pemerintah (sebagai pemegang kekuasaan), berdampak pada kemacetan program untuk memperkuat konsep wawasan nasional.

Penelitian ini didukung oleh data yang bersumber dari perpustakaan dan dokumen serta menggunakan pendekatan kelembagaan dan sistem politik. Pendekatan ini menekankan pada prosesual dan pemikiran teoritik. Metode pengumpulan data meliputi metode studi pustaka serta studi dokumendokumen. Analisis data menggunakan metode analisis evaluatif.

Kedua, penelitian dari Lutter Ariestino dan Sri Kusriyah, dengan judul Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilihan Umum Di Kota Semarang. 12 Penelitian ini menjelaskan bahwa tugas Partai Politik dalam penyediaan sarana pendidikan politik untuk publik adalah tugas yang harus dikerjakan untuk mewujudkan suatu cita-cita bangsa ini, dengan partisipasi masyarakat memilih dalam pemilihan umum, terutama masyarakat di Kota Semarang . Besarnya jumlah suara yang disalurkan oleh rakyat dalam pemilihan umum menunjukkan peran partai politik dalam menyediakan materi tentang pendidikan politik.

_

¹² Sri Kusriah. (2017). Peran Partai Politik Di Dalam Pelaksanaan Pendididkan Politik Dalam Rangka Untuk Meningkatkat Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilihan Umum Kota Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No 3. Hal 625-636

Pendidikan politik yang diberikan untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh partai politik di kota Semarang meliputi: Partai Gerindra, dan partai Golkar. Pendidikan politik partai Golkar tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, maka dari itu penulis membuat skripsi ini dengan rumusan masalah antara lain: Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Semarang?. Apakah dampak pendidikan politik yang dilakukan memberikan inovatif dan peran aktif kepada masyarakat dalam mengikuti pemilu? dan Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan politik dari partai politik di Kota Semarang.

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui pendidikan politik yang telah dilakukan oleh parpol di kota Semarang apakah telah sesuai dengan cita-cita demokrasi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang telah dilakukan oleh partai-partai politik di Kota Semarang sudah berhasil dengan peningkatan tajam dalam pemilihan umum.

Ketiga, penelitian dari Dwi Saputro, dengan judul *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah*. Penelitian ini menjelaskan mengenai Partai politik yang merupakan suatu elemen penting dalam negara yang menganut demokrasi. Salah satu fungsi dibentuknya partai politik yaitu sebagai institusi

¹³Yulianto Dwi Sputro, (2005). Peran Parti Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di Dpd Ii Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014), Jurnal Ketahanan Nasional, Vol, 21 No. 1 Hal 34-42

politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kader-kader partai politik maupun kepada masyarakat.

Dalam sistem demokrasi partai politik menjadi pilihan sebagai alat dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Pendidikan politik adalah usaha untuk dapat mewujudkan demokrasi di Indonesia yang sehat dan berkualitas. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu membahas tentang peranan partai politik dalam pendidikan politik pada generasi *milenial* dan implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah dengan studi kasus pada DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur.

Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kulitatif, yang memberikan gambaran tentang fenomena sosial yang komplek terjadi di dalam masyarakat. Proses penelitian ini dilakukan dengan memilihan informan yang dianggap memenuhi kriteria, penelitian dengan metode *purposive sampling*. Dalam hal ini informan yang dipilih adalah pengurus Partai Golkar Kota Malang. Teknik penelitian dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya dianalisis menunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa partai politik memiliki peran dalam memberikan pendidikan politik pada kader maupun pada masyarakat masih cukup rendah. Metode dan materi pendidikan yang diberikan oleh partai politik masih sangat konseptual dan kurang aplikatif. Metode evaluasi dalam pemberian materi pendidikan politik tidak berjalan dengan efektif, sehingga

peran partai politik dalam memberikan pendidikan guna memberi penyadaran kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara menjadi kurang efektif atau rendah.

Keempat, penelitian dari Budi Prayoga , dengan judul *Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik.* ¹⁴ Penelitian ini memaparkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari partai politik ialah sebagai sarana untuk pendidikan politik terhadap anggota dan waga negara agar dapat menjadi warga negara Indonesia yang sadar tentang suatu hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maksudnya adalah partai politik yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan terhadap seluruh kalangan masyarakat, dengan materi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Gresik, serta faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat selama jalanya pelaksanaan pendidikan politik. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

¹⁴Ayub Budi Prayoga. (2013). Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik, Vol. 1, No. 3, Hal 1-15

Data diperoleh dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik, ketua fraksi PKB DPRD Kabupaten Gresik, dan dari masyarakat. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas, akan tetapi pendidikan politik yang di sampaikan tidak optimal.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi jalanya pendidikan politik ini sehingga pendidikan politik yang dilaksanakan menjadi tidak maksimal. Pada penelitian ini peneliti memberikan saran supaya perlu adanya perubahan dalam melskukan pendidikan politik kepada masyarakat, baik berupa perubahan bentuk komunikasi, kemudian materi, setting atau tempat pelaksanaan dan metode yang digunakan, dengan tujuan tercapainya keinginan sebenarnya dari pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat luas.

Kelima, penelitian dari Nur Fadillah, dengan judul *Pendidikan Politik Oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016.* Penelitian ini mennelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan salah satu dari fungsi sebuah partai politik ialah sebagai sarana pendidikan politik untuk anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dalam suatu negara.

_

¹⁵Ichwan Nur Fadillah, (2017). Pendidikan Politik Oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016, Jurnal Jom Fisip Vol. 4 No. 1 Hal 1-13

Dapat disimpulkan bahwa partai politik yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendidik semua masyarakat, dengan mengunakan materi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terhadap peran Partai Nasdem dalam mendidik masyarakat di kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk melaksanakan pendidikan politik.

Pada penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi. Sumber data diperoleh dari Kader-kader DPD Partai Nasdem Pekanbaru, dan selanjutnya, data yang diperoleh dari lokasi penelitian akan diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan cara menjabarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Nasdem Pekanbaru sudah melakukan kegiatan pendidikan politik terhadap masyarakat umum, akan tetapi, upaya untuk melakukan pendidikan politik belum maksimal. Peneliti merekomendasikan kepada Partai Nasdem Pekanbaru bahwa perlunya melakukan perubahan dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat, perubahan perubahan tersebut baik dari bentuk komunikasi, materi, dan metode pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan nyata yaitu memberikan perubahan kepada masyarakat.

Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pertama, tempat penelitian yang akan

dilakukan. Kedua, tujuan penelitian ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pendidikan politik yang telah di lakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba pada masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.

F. Kerangka Teori

1. Partai Politik

a). Pengertian Partai Politik

Secara harfiah dapat dikatakan partai politik merupakan suatu perkumpulan masyarakat yang terorganisasi dan anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang memiliki kesamaan. Tujuan dari kolompok ini yaitu untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dapat merebut suatu kedudukan dalam politik dengan cara konstitusional untuk dapat melakukan kebijaksanaan dan peraturan mereka.¹⁶

Partai politik adalah instrumen yang tidak dapat di pisahkan dengan sistem demokrasi di berbagai negara. Suatu negara tidak dapat dikatan demokratis jika di dalamnya tidak terdapat partai politik karena hakekatnya partai politik adalah sebuah manifestasi dari kebebasan masyarakat dalam membentuk kelompok yang sesuai dengan kepentinganya. Keberadaan suatu partai politik bisa dirasakan sebagai susatu bentuk kebebasan dari Hak Azasi Manusia dan keberadaanya sebagai badan hukum.

_

 $^{^{16}\}mathrm{Miriam}$ Budhiarjdo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hal. 60

Dalam kebebasan hak asasi yang di maksud yaitu kebebasan dalam berserikat dan untuk hidup berorganisasi. Maka dari itu, dalam perkembanganya kebebasan berserikat adalah suatu kebebasan yang resmi dan diakui secara universal dan kemudian dapat dikenal dengan kemerdekaan yang berserikat (*freedom of assosiation*). Menurut Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan yang beserikat, harkat warga negara yang berkemanusiaan bisa berkurang dengan sendirinya seseorang tidak bisa menyampaikan pendapatnya dan menurut keyakinan di dalam hati nuraninya.¹⁷

Penjelasan mengenai partai politik dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: partai Politik merupakan organisasi nasional yang berifat nasional yang di bentuk oleh kelompok warga negara indonesia secara sukarela dengan dasar persamaan keinginan dan cita-cita dengan tujuan untuk memperjuangakan dan untuk membela suatu kepentingan politik dari anggotanya, warga negara, bangsa dan negara, dan dapat memelihara keutuhan negara republik indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Dari pengertian yang tealah di jelaskan di atas, dapat disimpulkan partai politik adalah kelompok masyarakat yang terorganisasikan, yang memiliki tujuan tertentu dan berusaha untuk mendapatkan tujuan itu dengan

_

¹⁷Muhadam Ladolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawaji Pers, 2015, Hal. 7-8

¹⁸*Ibid.*, Hal. 13

cara mengambil bagian-bagian dalam perebutan bentuk kekuasaan melalui pemilihan umum. Salah satu komponen dari infrastruktur politik yaitu partai politik, dimana partai politik memiliki peran sebagai perantara yang menghubungkan berbagai aspirasi-aspirasi yang menyebar di dalam masyarakat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

b). Peranan dan Fungsi Partai Politik

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 fungsi dari Partai politik ialah sebagai sarana:

- 1. Pendidikan politik untuk anggota dan masyarakat luas supaya menjadikan warga negara Indonesia yang sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara.
- Menciptakan suasana yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- Penampung dan penyalur aspirasi politik masyaraka agar keikut sertaanya dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4. Partisipasi politik masyarakat Indonesia.
- 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui,

2. Pendidikan politik

Pendidikan politik adalah suatu proses yang pengajaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik melalui media yang berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti halnya kursus, dan pelatihan kepemimpinan. Selain itu, peran pendidikan politik juga sangat dibutuhkan untuk dapat menunjukan bagaimana berpolitik yang baik, bersaing secara profesional, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi dan memahami aturan. 19

Pendididkan politik bukan penggabungan dari kata pendidikan dan politik, Pendidikan politik adalah salah satu bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan kepada pengupayaan untuk membinaan kemampuan individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan dimensi sosialnya yang berkaitan dengan kedudukanya sebagai warga negara. Mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu dapat berkembang dan menjadi lebih aktif serta kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya.²⁰

Beberapa definisi mengenai pendidikan politik adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan politik adalah suatu bentuk dari pendidikan yang dilakukan untuk orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader agar dapat bertarung politik dengan baik dan mendapatkan

.

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 20-21

 $^{^{20}\}mathrm{Eko}$ Handoyo Dan Puji Lestari. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, Hal.9-10

penyelesaian politik, agar memenangkan pertarungan politik dalam perjuangan politik.

b. Pendidikan politik adalah bentuk upaya pembelajaran yang internasional, yang disengaja dan secara sistematis agar dapat membentuk individu kader politik, sehingga mampu menjadi sorang politikus yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai suatu tujuan politik.

c. R. Hayer menyebut:

Pendidikan politik ialah usaha yang membentuk manusia agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab dan aktif dalam politik.

- d. Herman Giesecke seorang ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman menyebut pendidikan politik sebagai:
 - 1. Bildungwissen
 - 2. Orientierungwissen
 - 3. Verhaltungsweisen
 - 4. Aktionwissen²¹

Inti dari pendidikan politik adalah tentang pemahaman politik atau pemahanan aspek-aspek politis dari setiap permasalahan politik. Pemahaman politik juga berarti pemahaman tentang konflik. Banyaknya suatu konflik di dalam masyarakat disebabkan oleh adanya bentuk kontroversi, perbedaan pemikiran, sikap, dan kepentingan dalam

 $^{^{21}}$ Kartini Kartono, (2009), Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa, Bandung: Mandar Maju, Hal. $64\,$

masyarakat luas. Oleh karena itu wajar jika di dalam masyarakat muncul persaingan dan ketegangan yang menjadi konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini yaitu memengaruhi dan ikut serta memberian dan mengambil keputusan di tengah konflik politik dan pertarungan konflik itu.

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan teori yang di kemukakan oleh Herman Giesecke yang menyatakan sebagai berikut: "politisce bildung its bildungs-wissen, orientierrungwissen, vherhaltungwissen und aktionwissen".

Dalam tafsiran Giesecke, pendidikan politik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bildungeissen

Bildungeissen yaitu mengetahui dan memahami gambaran manusia/menssbeld dan perkembangannya, serta gambaran kebudayaan bangsa sendiri, berdasarkan satu Menschanschauung (visi kemanuasiaan tertentu).

Bagi Indonesia, *Menschanschauung* ini adalah PANCASILA, yang digunakan sebagai landasan filsafi dari pendidikan politik, kemudian dijadikan ancang-ancang bagi penyusunan teori mengenai pendidikan politik.²²

_

²²*Ibid.*, Hal. 97-98

2. Orientierungwissen

Orientierungwissen artinya berorientasi kepada paham kemanusiaan dan dapat memberikan kebaikan, kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan kesejahteraan kepada setiap warganegara dan juga umat manusia.

Pendidikan politik harus melakukan penekatan pada *totalitas person*, pada unsur afeksi emosi dan sentimenya, pada ambisi, harapan dan aspirasinya pada cita cita dan kebutuhanya, ringakasanya pada visi total/global dari pwrson manusianya, dalam mana *sosialitas*, *individualitas* dan *moralitas* tergarap di dalamya. Unsur sosialitas dengan sendiriny mengait *dharma bakti* seseorang dalam lingkungan sekitar, sesama manusia dan masyarakatnya.

3. Verhaltungsweisen

Verhaltungsweisen yaitu menunjuk atau mengarah-arahkan pada tingkah laku pemahaman Hukum, Norma, Tataa Tertib dan semua peraturan yang sah untuk mengatur tingkah laku politik.

Tujuanya ialah agar subyek (pelaku politik) menjadi lebih cermat dan menjadi lebih arif bijaksana dalam menangapi kondisi politik yang ada. dengan cara melalui jalan sebagai berikut

- mengendalikan perilaku laku sendiri atas pertimbangan hati nurai yang sesunguhnya
- sehingga seseorang tidak menjadi salah bertindak, tidak *egoistis* egosentris, dan tidak menajdi "political animal"

- menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan kesusilaan.²³

4. Aktionwissen

Aktionwissen yaitu mau berbuat atau beraksi, mampu bertingkah laku/berbuat politik secara cermat, tepat dan benar, di dukung dengan prinsip kebenaran dan berkeadilan, di dahului oleh refleksi obyektif dan wawasan yang kritis.²⁴

Berdasarkan penjelasan teori diatas diketahui bahwa teori tersebut selaras dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan teori yang dikemukakan oleh *Herman Gieseceke* tersebut peneliti mengetahui seperti apa pendidikan poltik yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Musi Banyuasin, dan dengan adanya pendidikan politik ini , diharapkan akan mendorong terciptanya kepribadian politik yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar pada kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki tujuan yang sama yaitu tujuan tersebut tidak lain untuk membuat masyarakat agar lebih memahami mengenai kesadaran politik dan berperilaku dengan baik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

²³ *Ibid.*, Hal.100

²⁴ *Ibid.*, Hal. 104

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah agar mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini terdapat empat kata kunci yang harus diperhaikan adalah 1. cara ilmia 2. Data 3. tujuan dan 4. kegunaan. Cara ilmiah yaitu suatu kegiatan penelitian yang didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan, ialah *rassional, empiris* dan *sistematis. Rasional* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan cara yang di anggap masuk akal, sehingga mudah di pahami oleh penalaran manusia.

Kemudian *empiris* yaitu cara yang dilakukan dapat dicermati oleh indera manusia, yeng sehingga orang lain bisa mengamati dan bisa mengetahui cara yang di pergunakan. (membedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencaribarang yang hilang, atau provokator atau orang yang melarikan diri saat menjadi tahanan melalui paranormal). *Sistematis* adalah proses yang digunakan pada saat penelitian itu dan mengunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis atau masuk akal.²⁵

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Tujuan tersebut bisa dilakukan melalui dua cara antara lain yang yaitu dengan melakukan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

 $^{^{25}} Sugiono.~(2017). Metodologi~Penelitian~Kuantitatif, Kualitatif~Dan~R\&D.~Bandung:$ Alfabeta, Cet, Ke-26, h. 2.

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan juga gambar.

Penelitian kualitatif merupakan penelitianyang bertujuan mencari makna, pengertian,dan pemahaman. *Verstehen* tentang fenomena, atau kejadian, yang terjadi pada kehidupan manusia dengan keterlibatan langsung dan tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, menyeluruh dan kontekstual.²⁶ Dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif lah yang di gunakan oleh peneliti dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis merupakan suatu cara pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang ada dan kemudian dianalisis, sehingga memperoleh suatu gambaran atau gagasan tentang apa yang telah diteliti. Data-data yang di analisis berupa kata-kata, gambar, dokumentasi dan tingkah laku.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data *Primer*, adalah data yang di peroleh langsung dari para informan (orang yang memberikan informasi) dalam penelitian ini yaitu: anggota kader-kader DPD II Partai Golkar Musi Banyuasin. Kepada informan tersebut akan ditanyakan seperti apa atau bagimana pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba Tahun 2019.
- b. Data *Sekunder*, data ini merupakan data pendukung/penunjang dari data primer seperti buku, jurnal, himbauan-himbauan, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan

_

²⁶ Yusuf Muri. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup, Cet, Ke-5 h. 328.

pendidikan politik (Pendidikan Politik Oleh DPD II Partai Golkar Muba Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2019)

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara (interview)

Wawancara atau *interview*: wawancara adalah tehnik yang bisa digunkan untuk pengumpulan data. Secara sederhana bisa dijelaskan bahwa wawancara atau *interview* merupakan suatu kejadian atau sebuah proses saling berinteraksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber infomasi atau informan yaitu orang yang diwawancarai (*interviwee*) dengan cara komunikasi secara langsung.²⁷ Wawancara atau interview secara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait seperti ketua atau perwakilan dari pengurus DPD II Partai Golkar Muba, anggota karang taruna, dan Masyarakat .

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat peninggalan atau dokumen-dokumen tertulis, seperti arsiparsip dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode-metode lain, maka metode penelitian ini

²⁷*Ibid.*, Hal. 372.

tidak terlalu sulit dalam artian jika terjadi suatu bentuk ketidak benaran sumber datanya masih tetap, belum berubah.

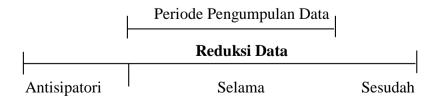
4. Lokasi Penelitian

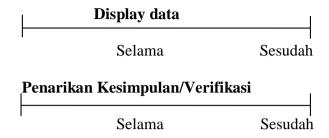
Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahapan yang sangat berpengaruh terhadap penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkanya lokasi penelitian dengan ini objek dan tujuan penelitian bisa ditetapkan sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitiannya, lokasi penelitian ini ialah DPD II Partai Golkar kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun alasan pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah Partai Golkar kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin pada pemilu 2014 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan jumlah suara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Miles dan Huberman. Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan untuk memproses data yang telah di dapatkan sebelumnya melalui wawancara, kutipan, dan sari dari dokumen.

Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alir sebagai berikut:





Sketsa 1.1Komponensial Analisis Data Model alir, 2019

Berdasarkan Sketsa 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: 1. Reduksi data (data reduction), 2. Data display (display data), 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data ialah bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penganalisisan data. Peneliti memilih data mana yang akan diberikan kode atau simbol, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman dari sejumlah potongan-potongan atau pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, mentitik fokuskan, membuang, dan mengorganisasikan suatu data dalam satu cara, di mana dari kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pra wawancara dengan anggota atau kader-kader DPD II Partai Golkar di kecamatan sekayu kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan analisis terhadap data-data yang didapat dari jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pendidikan politik lainnya.

b. Data display

Data display merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang sudah tersusun dan membolehkan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini peneliti menyajikan data yang telah diperoleh sebelumnya yang berupa informasi mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar kecamatan Sekayu kabupaten Musi Banyuasin.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan/Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan atau penemuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. penemuan dapat berbentuk deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih belum jelas kebenaranya sehingga setelah di lakukanya penelitian menjadi jelas dan bisa berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian. sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 Bab, yaitu:

BABI

PENDAHULUAN

Pada bagian BAB ini Peneliti akan menulis tentang informasi sebagai berikut:

32

²⁸ *Ibid.*, Hal. 407-409

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian atau Manfaat
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Metodologi Penelitian
 - 1. Metode Penelitian
 - 2. Data dan Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Lokasi Penelitian
 - 5. Teknik Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bagian bab kedua ini peneliti akan menjelaskan bagaimana keadaan secara rinci mengenai lokasi penelitian, dan akan menjelaskan secara detail gambaran wilayah tersebut.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari data-data yang sudah didapatkan akan dikaitkan dengan temuan di lapangan dan pertanyaan penelitian yang di ajukan pada bab awal, kemudian data yang diperoleh oleh peneliti akan di bahas bagaimana keterkaitannya dengan teori yang sudah ada serta menjelaskan hasil temuan berdasarkan sudut pandang subjek dengan sudut pandang teoritis.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhir bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian. pada bagian saran peneliti memberikan rekomendasi-rekomendasi yang biasa di lakukan oleh pihak yang terlibat

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Partai Golkar

Partai Golkar pertama muncul pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar pada masa akhir dari pemerintahan Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golk ar (Sekber Golkar).

Sekber Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerjan Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember 1965 Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang dihimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (Kino), yaitu:

- 1. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- 2 Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari)
- **3.** Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- 4. Organisasi Profesi
- **5.** Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam)
- **6.** Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971
- 7. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)²⁹

Ke- 7 (tujuh) Kino yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golkar. Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di luar dugaan.

²⁹Https//Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar Diakses Tanggal25 Desember 2019.

Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh.

Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum.

Konsolidasi Golkar punmulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi- aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh

pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatanjabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya
diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golkar sebagai jaringan
konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu
jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G
untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan
fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai
peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang
beringin ini selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir
dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi
bergulir.

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana- mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini

Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum Golkar dari masa ke masa :

- 1. Djuhartono (1964-1969)
- 2. Suprapto Sukowati (1969–1973)
- 3. Amir Moertono (1973–1983)
- 4. Sudharmono (1983–1988)
- 5. Wahono (1988–1993)
- 6. Harmoko (1993–1998)
- 7. Akbar Tandjung (1998–2004)
- 8. Jusuf Kalla (2004–2009)
- 9. Aburizal Bakrie (2009-)
- 10. Setya Novanto(2016-2019)
- 11. Airlangga Hartarto (2019-sekarang)³⁰

³⁰ Https//Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar Diakses Tanggal25 Desember 2019.

B. Visi Partai Golkar

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

C. Misi Partai Golkar

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut

Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat³¹

D. Tujuan dan Fungsi Partai Golkar

Partai Golkar bertujuan:

- Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD
 1945.
- 2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan

³¹Arsip DPD II Partai Golkar Muba 2015-2019

UUD 1945.

- Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Partai Golkar menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai citacita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan³².

 $^{^{\}rm 32}$ Arsip DPD II Partai Golkar Muba 2015-2019

E. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi Partai

1. Keanggotaan

- a. Anggota Partai Golkar adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.
- b. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai Golkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2. Sistem Kaderisasi Kader partai terdiri dari:
 - a. Kader Partai Golkar adalah Anggota Partai Golkar yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai.
 - b. Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan.

Kader dan disaring atas dasar kriteria:

- 1. Mental-Ideologi.
- 2. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai.
- 3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).
- 4. Kepemimpinan.
- 5. Militansi dan mandiri.
- 3. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa; Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi. Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban.

Struktur Organisasi Partai Golkar terdiri atas tingkat Pusat, tingkat

Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertingg partai yang bersifat kolektif yang memiliki wewenang :

- Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
- Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPP
 Partai Golkar mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan
 Pimpinan Daerah Provinsi.
- Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran
 Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dewan Pimpinan Pusat selain memiliki wewenang juga memiliki kewajiban, kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:

Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan
 Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan

Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.

 Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi yang memiliki wewenang:

- Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
- Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD
 Partai Golkar Provinsi.Mengesahkan Komposisi dan Personalia
 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Berkewajiban:

- Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah
- Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.

d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

- Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.
- Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai GolkarKabupaten/Kota.
- 3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan.
- 4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan.
 Sedangkan kewajiban dari Dewan Pimpinan Daerah
 Kabupaten/Kota adalah :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.³³

³³ Arsip DPD II Partai Golkar Muba 2015-2019

F. Lambang Partai Golkar



Gambar. 2.1 Lambang partai golkar

Arti Logo Partai Golkar

Lambang psrtsi golkar berupa pohon beringin yang di kelilingi untaian padi dan kapas dalam perisai segi lima, dengan pita bertuliskan Golongan Karya di bagian bawahnya.

- **1. Pohon Beringin** bermakna melindungi, yang berarti Partai Golkar memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia
- **2. Padi dan Kapas** merupakan lambang kesejahteraan Sosial untuk rakyat Indonesia

Bentuk:

3. Perisai Segi Lima melambangkan ideologi partai

Warna:

- 4. Warna Putih pada perisai bermakna kesucian
- 5. Warna Dasar Kuning bermakna kejayaan
- 6. 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17-8-45³⁴

G. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba

DPD II Partai Golkar Muba yang terletak di kelurahan serasan jaya, kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, ini merupakan cabang partai Golkar yang berada di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Ataupun juga disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Adapun visi dan misi Dpd partai golkar yaitu:

1. Visi dan Misi DPD II Partai Golkar Muba

Terwujudnya masyarakat indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, moderen, damai, adil, makmur, beriman dan berahlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

a. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kestuan Republik Indonesia.

³⁴ Https//Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar Diakses Tanggal25 Desember 2019.

- b. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakan supremasi hukum dan menghormati Hak Azasi Manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
- c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

2. Program Partai Golkar

- a. Ketersediaan pangan bagi masyarakat
- b. Menggalakan program penyediaan lapangan kerja
- c. Pengadaan rumah dengan harga terjngkau untuk masyarakat
- d. Partai golkar akan menjalankan visi 2045 aspirai pembangunan
 2030 melalui revolusi dunia digital.
- Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin³⁵

Kepengurusa dalam suatu organisasi atau lembaga menjadikan sangat penting untuk di perhatikan, maka dari itu berikut daftar anggota pengurus Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Musi Banyuasin 2019.

 $^{^{35}}$ Arsip Dpd II Partai Golkar Muba, 2015-2019

Tabel. 2. 1
Penngesahan Komposisi dan Pesonalia
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama NPAPG No Jabatan 1 Ketua Feri Yusmadi, SE 07100238510 Wakil Ketua 2 07080000011 Bidang Hub. Sri Retnosari, SH Pemerintahan, Dprd & Parpol 07080000003 3 Bidang Organisasi M. Hasan Usman, SE Bidang Kaderisasi Dan Brandhard, MH 07080000055 4 Keangotaan 07080000052 5 Bidang Pemenangan Anwar Hasan, BA Pemilu 07080000008 6 Bidang Pengabdian Anwar Qorik Masyarakat Imron Yusuf, SH 07080144083 7 Bidang Hukum Dan Ham Bidang Tani Dan Nelayan Heri Purnomo, ST 07080002243 8 9 Bidang Kopresasi Dan 07080000030 Awaludin Haitami, A.Md Umkm Candra Irawan 07080134147 10 Bidang Pemuda Olahraga Dan Seni Bidang Pendidikan Dan 07080144092 11 Adiansyahputra, Se, Penelitian S.Kom Hj. Aidah Niswa, SE 07080000007 12 Bidang Peranan Perempuan H. Daud Sobri 13 Bidang Keagamaan 07080134874 14 Bidang Informasi Dan Firmansyah Nasrul, St, 07080144831 Komunikasi MM 15 Bidang Tenaga Kerja Umar Imron Damiri 07080000079

16	Sekertaris	M. Rusli Mahdi	07080000053
Wakil-Wakil Sekertaris			
17	Bidang Hubungan	Euis Sari Mulyani, A.Md	07080134058
	Pemerintahan DPRD Dan		
	Parpol		
18	Bidang Organisasi	Yusmairin Yusman Haris	07080144087
19	Bidang Kaderisasi Dan	Nasirwan M. Senen	07080144085
	Keanggotaan		
20	Bidang Pemenangan	Fajariah Toni	07080134520
	Pemilu		
21	Bidang Pengabdian	Ir. M. Daud Madani	07080000019
	Masyarakat		
22	Bidang Hukum Dan Ham	M. Azim Cik Abun, SH	07080000025
23	Bidang Tani Dan Nelayan	Lia Maretha, SH	07080144101
24	Bidang Koprasi Dan	Supandi, SE	07080144925
	Umkm		
25	Bidang Pemuda Olahraga	Hendri Gunawan	07080144105
	Dan Seni		
26	Bidang Pendidikan Dan	Arliansyah	07080002001
	Pelatihan		
27	Bidang Peranan	Eva Gustina Yusmin	07080135087
	Perempuan		
28	Bidang Keagamaan	H. Iwan	07080144833
29	Bidang Komunikasi Dan	Nelly Suryanti	07080000010
	Informasi		
30	Bidang Tenaga Kerja	H. Iksan Anhar	07080144090
31	Bendahara	Jaini, Sos	07080000025
32	Wakil Bendahar	Ir. Andri Antoni	07080000022
	Bagian-Bagian	1	1
33		Arahman	07080144830

34	Bagian Hubungan	Sugeng Rianto	07080144811
	Pemerintahan, DPRD Dan		
	Parpol		
35	Bagian Organisasi	Kamada Usman, SH	07080000035
36		Titik Sutrisnawati, S.Pd	07080144828
37	Bagian Kaderisasi Dan	Sustiwi Agus	07080134658
	Keanggotaan		
38	Bidang Pemenang Pemili	Eni Erlisa, SE	07080146515
39	Bagian Pengabdian	Dwi Krisnawati Bahrim	07080144928
	Masyarakat		
40	Bagian Hukum Dan Ham	Heriawan Saputra, SH	07080144104
41	Bagian Tani Dan Nelayan	Ubaidillah, SE	07080144778
42	Bagian Koperasi Dan	Dedi Irawan, SE	07080144822
43	Umkm	Fitroni	07080144110
44	Bagian Pemuda, Olahraga	Mustamil	07080134917
45	Dan Seni	Apriadi	07080144853
46	Pendidikan Dan Pelatihan	Hj. Aidah Qorik, SE	07080144827
47		Suwandi Sukar	07080144108
48	Bagian Peranan	Anita Herawati	07080000047
	Perempuan		
49	Bagian Keagamaan	Asni Sukri	07080134241
50	Bagian Komunikasi Dan	Habibah Hadi	07080000038 ³⁶
	Informasi		
	•		•

(Arsip DPD Partai Golkar Muba, 2015-2019)

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas menjelaskan bahwa DPD II Partai Golkar Muba memiliki pengurus atau anggota yang berjumlah 50 orang dan sesuai dengan bagian masing-masing.

³⁶ Arsip Dpd II Partai Golkar Muba, 2015-2019

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba pada masyarakat Sekayu Musi Banyuasin, serta bagaimana bentuk pendidikan politik yang di lakukanyanya terhadap masyarakat sekayu dan faktor yang mempengaruhinya, data yang di peroleh akan di analisis dengan menggunakan teori yang di kemukakan oleh Herman Giescake, yang menyatakan bahwa "Politische Bildung Its Bildungswissen, Orientierrungwissen, Verhaltungwissen, Und Akstionswissen" teori ini dianggap peneliti mampu untuk menganalisa pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba, karena pada hakekatnya salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat ataupun para anggota kader-kadernya.

A. Pendidikan Politik oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

Pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk menyiapkan seta membentuk kader-kader dan masayarakat yang sadar akan politik dan mampu berpartisipasi dalam mencapai tujuan- tujuan politik. Pada intinya pendidikan politik ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman politik pada masyarakat sehingga menyadarkan pada hak dan kewajibanya sebagai warga negara yang baik dan juga untuk ikut serta mengatur tentang negara dan pemerintahan, juga ikut mengawasi jalanya gerak pembangunan, tanpa perlu menimbulkan konflik yang dapat membahayakan masyarakat luas.

Hadirnya pendidikan politik merupakan bentuk pembelajaran kepada masyarakat mengenai segala informasi politik maupun tentang hak-hak dan kewajibanya sebagai warga negara yang disampaikan secara langsung melalui berbagai kegiatan tententu. Penyampaian informasi tersebut dilaksanakan tanpa adanya bentuk paksaan (doktrinisasi) dari segi apapun yang disampaikan oleh partai politik pada masyarakat, sehingga kegiatan pendidikan politik berdampak pada masyarakat yang berpartisipasi secara aktif tanpa merasa tertekan karna adanya paksaan.

Berdasarkan daftar peserta pemilihan umum di kecamatan sekayu dan mempunyai jumlah yang relatif tinggi sehingga terdapat peran partai politik yang sesunguhnya yaitu untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar berperilaku dengan baik dan memahami tentang hak dan kewajibanya sebagai warga negara yang baik sehingga akan menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan tidak saling menghina satu sama lain yang didasari dengan perbedaan pendapat. Sekjen DPD II Partai Golkar Muba mengatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba untuk memberikan pemahamaan kepada masyarakat tentang cara dan berperilaku yang baik dan tidak mudah terprofokasi untuk menyuarakan aspirasinya dalam pemilihan umum yaitu dengan melakukan pendidikan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD II Partai Golkar Muba yaitu memberikan pendidikan politik kepada anggota dan kaderkader partai politik dan juga masyarakat. Adapun tujuan dari dilakukanya pendidikan politik ini ialah untuk dapat meningkatkan kualitas anggota dan kaderkader partai serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dengan

baik agar tidak mudah terprovokasi. DPD II Partai Golkar Muba melaksanakan Pendidikan Politik yang berupa sosialisasi dan diklat terhadap anggota dan kader serta masyarakat.

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh *Herman Giescake* bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba yang *pertama* yaitu *Bildungwissen* dimana *Bildungwissen* dilakukan untuk mengetahui serta memahami karakteristik manusia yaitu dengan cara pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masyarakat.

Penjelasan ini ditegaskan oleh Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, yang menyatakan bahwa,

"Partai Golkar sendiri ketika akan melakukan kegiatan hal utama yang dilakukan adalah mencari atau mengajak tokoh masyarakatnya yang pahamdengan karakter masyarakat itu, karena warga sekayu sangat menghormati tokoh-tokoh yang sudah sesepuh dan bisa dibilang orang yang sangat berpengaruh, dan itu kita ajak berkumpul untuk diberikan pemahaman mengenai materi-materi mengenai pendidikan politik." 37

Secara hakikatnya manusia merupakan makhluk individu, selain sebagai makhluk individu manusia juga merupakan makhluk sosial. Tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup tanpa adanya peran dari manusia lainnya. Oleh karena itu selain kebutuhan akan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar

55

³⁷ Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba 16 Desember 2019

sesama. Hubungan sosial yang terjalin bisa terjadi pada sesama manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Karakter atau watak seseorang sulit untuk diubah karena merupakan sifat dasar yang melekat pada diri masing-masing individu. Dalam kehidupan sosialnya manusia sering kali dinilai dari karakter dan kepribadiannya, dua hal yang berbeda tetapi tak jarang dipahami secara sama. Karakter manusia pada umumnya dilekatkan pada norma moral, sedangkan kepribadian merupakan sifat hakiki yang tercermin pada sikap manusia yang membedakannya dari manusia lain. Meski berbeda, namun karakter dan kepribadian sama – sama merupakan hasil interaksi antara manusia dengan pengalaman hidup dan lingkungan sekitarnya. Karakter bisa dibentuk, sedangkan kepribadian bisa diubah. Keduanya memiliki hubungan dalam pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Karena pada hakikatnya karakter dan kepribadian manusia dapat dirubah dengan adanya pengaruh lingkungan dan manusia lain.

Pelakasanaan pendidikan politik yang diakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba yaitu, mengolongkan pendidikan politik menjadi dua yaitu pendidikan politik jangka pendek dan pendidikan politik jangka panjang. Pendidikan politik jangka pendek merupakan pendidikan yang di lakukan terhadap saksi-saksi yang ikut serta mengawal dan menjadi saksi untuk para anggota partai yang mejadi peserta pemilu.

_

³⁸ Dedi hartono dan Diananta Pramita Sari, (2018). *Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang terbuka publik*, Jurnal National Academic Journal Of Architecture, Vol. 5 No. 2 Hal 60

Pendidikan politik jangka panjang yaitu pendidikan yang di tujukan kepada anggota serta kader-kader partai yang berada di tingkat desa, dan kecamatan biasa disebut dengan pelatihan kader teritorial. Pendidikan politik ini dilakukan dengan adanya bantuan dari adanya sayap partai seperti lembaga dakwah daerah pendidikan dilakukan dapat melalui karang taruna, remaja masjid dan organisasi sayap partai lainnya.

Dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat partai golkar mempunyai serta memanfaatkan organisasi sayap partai yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Seperti dalam bidang keagamaan, partai golkar mempunyai organisasi yang disebut Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan dimana organisasi ini menyampaikan informasi politik melalui kegiatan dakwah yang di sampaikan oleh ulama-ulama ataupun tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kehidupan beragama dan bernegara kepada masyarakat.

Penjelasan diatas di benarkan oleh Anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang menyatakan bahwa:

"partai golkar mempunyai organisasi sayap ada yg didirikan dan ada yang mendirikan dari agamanya ada namanya MDI dmana, MDI ini bertugas memberikan dakwah kepada masyarakat khusnya di bidang agama islam untuk memberikan informasi kepada mayarakat terhadap isu-isu yang ada dan selalu meningatkan masyarakat kepada perbedaan" 39

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kerukunan dalam beragama dan sering toleransi mengenai agama lain.

³⁹Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 16 Desember 2019.

Untuk menarik perhatian masyarakat, DPD II Partai Golkar memilih para tokohtokoh masyarakat dan tokoh yang memiliki peran penting terhadap masyarakat.

Hal ini dibenarkan oleh masyarakat kecamatan sekayu yang menyatakan bahwa:

"untuk acara pengajian kita rutin dilakukan, kegiatan ini juga sering didukung oleh Partai Golkar dan dihadiri juga oleh kader-kader partai golkar itu sendiri. Partai Golkar juga mengundang tokoh ulama untuk memberikan ceramah keagamaan" 40

Selain bidang agama DPD Partai Golkar juga memiliki organisasi sayap partai di bidang kepemudaan yaitu Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG, dimna AMPG merupakan organisasi sayap partai yang di bentuk untuk mengajak kaum milenial agar ikut serta berperan dalam politik di indonesia dan mampu berperilaku baik dalam melakukan kegiatan mensuarakan aspirasinya terhadap pilihan politik. AMPG memiliki peran penting dalam memeberikan pemahaman bagi pemuda generasi bangsa, untuk itu dalam memberikan pemahaman tentang politik kepada kaum milenial DPD Partai Golkar memanfaatkan AMPG untuk menjalankan tangung jawabnya sebagai organisasi sayap partai yang bergerak di bidang kepemudaan. Salah satu cara AMPG melakukan pendekatan kepada pemuda yang ada di kecamatan sekayu adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan karang taruna dan Irmas (ikatan remaja masjid) yang ada di daerah sekayu. Pernyataan ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba:

"untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum milenial partai golkar memiliki organisasi sayap partai di bagian kepemudaan yaitu AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) yang melakukan pendekatan

_

⁴⁰ Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 17 Desember 2019

pada karang taruna dan irmas-irmas yang ada di sekayu, kegiatan yang dilakukan dengan karang taruna yaitu seperti mendukung kegiatan turnamen yang tujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama pemuda dan masyarakat, untuk kegiatan yang dilakukan dengan irmas yaitu mengelar kegiatan pengajian dan tak lupa didalamnya itu kita memberikan pemahaman pemahaman politik bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bagaimana cara berpatisiasi politik dengan baik yang tidak saling merugikan satu sama lain"⁴¹

Pelaksanaan kegiatan yang di lakukan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba melalui karang taruna ini memberikan respon positif terhadap pemuda yang ada di sekayu, bukan hanya mendukung kegiatan seperti turnamen DPD partai golkar juga memberikan wawasan terhadap masyarakat sekayu khususnya bagi pemudanya dengan memberikan beberapa materi yang berkaitan dengan empat pilar bernegara,. Pernyataan ini dibenarkan oleh Anggota Karang Taruna Kecamatan Sekayu:

"kegiatan yang paling banyak diminati oleh para pemuda di sekayu yaitu olahraga, pemuda di sekayu banyak yang gemar olahraga seperti sepak bola dan futsall untuk itu kami karang taruna sangat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dan juga pihak golkar juga ikut mendukung kegiatan ini seperti mendukung untuk mensponsori dan bukan itu saja kami semua juga di berikan pengetahuan wawasan mengenai politik dan bagaimana untuk menyikapi gejolak politik yang ada di indonesia saat ini"⁴²

Pendidikan politik ini dilakukan harus benar-benar bersifat membina dan harus sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah. Maka dari itu, sebelum dilakukannya pendidikan politik pihak DPD II Partai Golkar Muba harus benar benar bisa menyerap isu isu yang beredar di masyarakat. Pendidikan politik ini

_

⁴¹ Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 16 Desember 2019.

⁴² Kabid Karang Taruna Kecamatan Sekayu, Wawancara 17 Desember 2019

bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap isu isu yang ada.

Informasi yang di sampaikan dalam Pendidikan politik ini dapat berupa informasi-informasi mengenai UUD 1945, pancasila dan mengenai isu-isu yang beredar di dalam masyarakat. Selain itu pelaksanaan pendidikan politik ini juga memiliki panduan khusus seperti modul. DPD Partai Golkar Muba memiliki modul panduan untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, seperti halnya program pendidikan politik. Modul tersebut berisikan tentang informasi yang telah dianalisis dari isu-isu yang telah beredar dikalangan masyarakat.

Setiap pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba selalu melibatkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dalam lapisan masyarakat itu, dan juga melakukan pendekatan-pendekatan melalui organisasi sayap partai agar tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik, dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kedua menurut Herman Giesecake yaitu Orientierungwissen yang berarti mampu berorientasi dengan paham suatu kemanusiaan yang dapat memberikan suatu keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat. artinya mampu mengenal tentang situasi dan kondisi politik yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta mampu mewujudkan dan memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat.

Hal ini didukung dengan pernyataan anggota DPD II Partai Golkar Muba

"disini kami mencoba untuk menggali lebih dalam tentang apa keinginan masyarakat itu seperti apa yang di harapkan masyarakat sehingga kami disi sebagai partai politik yang memiliki fungsi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah atau kami bisa membantunya."

Tujuan pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD II Partai Golkar Muba pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu agar dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat serta dapat memberikan atau memenuhi keinginan masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berpolitik dengan baik agar tidak mudah terprovokasi satu sama lain, serta mampu untuk saling menghormati tentang perbedaan pendapat. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba melakukan kegiatan dialog interaktif dengan perwakilan-perwakilan dari berbagai desa di Kecamatan Sekayu.

Dialog interaktif

Dialog interaktif merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, kegiatan ini memiliki tujuan untuk membahas suatu masalah dengan tujuan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari suatu masalah kegiatan ini dilakukan dengan cara dimana Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Muba mengumpulkan atau mengajak perwakilan kader-kader yang ada di Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Sekayu. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan dengan kondisi dan situasi permasalahan yang yang ada di kecamatan tersebut. Sekjen DPD II Partai Golkar Muba menyatakan bahwa;

"Pendidikan politik yang kami dilakukan disini salah satunya adalah kegiatan dialog interaktif antara masyarakat yang di wakilkan dengan kader-kader, dimana kegiatan ini kami lakukan selain untuk melakukan pemahaman tentang perilaku sebagai warga negara yang baik dan paham tentang suatu hak dan kewajiban sebagai warga negara kami juga melakukan tukar pikiran dan mendengarkan permasalahan yang

ada di masyarakat itu dan mencoba untuk memberikan jalan keluarnya seperti contohnya tentang hal-hal yang merusak dan meresahkan warga yaitu mengenai penyalah gunaan obat-obatan terlarang. Kegiatan ini tentunya memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk mengenal tentang bahayanya narkoba dan juga mendorong masyarakat agar paham tentang aturan hukum, norma dan tata tertib."⁴³

Dengan melakukan penyuluhan ini secara langsung partai politik telah melaksanakan salah satu fungsinya yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat indonesia.mengenai hukum ketatanegaraan yang berlandaskan UUD 1945.



Gambar. 3. 1 (Kegiatan Dialog Interaktif oleh DPD Partai Golkar Muba, 2019)

Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi lebih memahami tentang hak-hak yang seharusnya dilakukan

_

 $^{^{\}rm 43}$ Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 11 November 2019

dan yang seharusnya tidak dilkukan. Masyarakat juga dapat memahami mengenai norma-norma hukum di indonesia.

Penjelasan ini didukung oleh masyarakat Kecamatan Skayu:

"Partai Golkar juga melakukan acara dialog kepada kami, mengenai persoalan yang meresahkan warga seperti narkoba dan hal-hal yang negatif bagi masyarakat. Partai Golkar memberikan informasi kepada kami tentang aturan dan Undang-Undang bahaya narkoba".

Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba melakukan pendidikan politik yang memiliki tujuan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan pula dapat berperan dalam menjawab kegelisahan dan keresahan masyarakat itu.

Ketiga menurut Herman Giesecake yaitu Verhaltungwissen merupakan mengarahkan pada pemahaman hukum, norma tata tertib, dan semua peraturan. Seperti halya DPD II Partai Golkar Muba memberikan pendidikan politik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat mengenai hukum dasar yang berlaku di indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Pernyataan ini di dukung oleh peryataan dari Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar yang menyatakan bahwa:

"partai golkar mengharapkan dengan dilaksankanya pendidikan politik ini masyarakat dapat lebih lagi untuk memahami tentang norma-norma yang ada di indonesia seperti halnya tidak melakukan tindak kejahatan, yang meresahkan warga dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan yang penting masyarakat tidak saling merugikan satu sama lain dan agar hidup selalu rukun dan saling menghormati"⁴⁵

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti melalui dokumentasi dan wawancara, didapatkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD II

.

⁴⁴ Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 17 Desember 2019

⁴⁵ Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba 16 desember 2019

Partai Golkar Muba yang bersifat mengarahkan atau mengajak masyarakat lebuh mengerti tentang hukum, norma, tata tertib dan semua peraturan, yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Road Show



Gambar 3.2 (Kegiatan *Road Show* DPD II Partai Golkar Muba, 2019)

Road Show merupakan suatu kegiatan yang diadakan untuk mengenalkan serta mengajak banyak orang agar mengikuti sesuatu yang biasa disebut dengan kegiatan Public Realtion dalam upaya memuaskan banyak orang untuk ikut dalam suatu kesempatan yang menarik perhatian publik, dan Road Show juga suatu proses penanaman nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman-pemahan terhadap masyarakat.

Kegiatan *Road Show* yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyampaikan nilai-nilai politik yang hidup dalam diri seseorang sebagai bagian dari sistem dan nilai-nilai budaya pada masyarakat itu sendiri. *Road Show* ini juga memiliki fungsi untuk dapat membentuk dan merubah nilai-nilai politik seseorang sehingga orang yang bersangkutan dapat berperilaku politik dengan baik.

Sekjen DPD II Partai Golkar Muba menyatakan:

"Kegiatan *Road Show* ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat untuk mengenalkan beberapa aspek penting dalam berperilaku dengan baik terhadap menyikapi suatu keadaan politik. Kegiatan *Road Show* ini dilaksanakan dengan cara mengajak serta mengumpulkan orang-orang yang dapat mewakili dari masing-masing desa dan nantinya dapat menyampaikan kembali hasil dari kegiatan ini kepada masyarakat."

Kegiatan *Road Show* ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang berperan penting atau dapat mempengaruhi masyarakat lainya yang ada di Kelurahan/Desa. Materi yang di berikan berupa berbagai informasi mengenai hal hal yang bersangkutan dengan politik dan tema yang berasal dari isu- isu yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini selain untuk memberikan pendidikan politik, kegiatan *Road Show* ini pun dilengkapi dengan kegiatan *sharing* atau tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan politik yang ada.

_

⁴⁶ Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 11 November 2019



Gambar 3.3 (Undangan Kegiatan *Road Show* DPD II Partai Golkar Muba, 2019)

Pelaksanaan pendidikan politik seperti *Road Show* yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar, dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan ormas Partai Golkar, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang di hadapi masyarakat.

Hal ini didukung oleh pernyataan sekjen Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba

"partai golkar memang sering melakukan kegiatan *road show*, sebelum akan melakukan *road show*, kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat

dengan mudah untuk melakukan *road show* dan dapat menentukan tema yang tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat³⁷

Road show yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba sangatlah memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih mengenal tentang politik dan juga masyarakat juga lebih dapat menghargai hak-hak orang lain. bukan hanya tentang politik melainkan masyarakat juga di tuntut agar lebih paham mengenai paham-paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memahami tentang norma-norma yang didasari undang-undang dasar 1945 dan pancasila.

Hal ini didukung oleh salah satu tokoh masyarakat sekayu yang menyatakan bahwa :

"Partai Golkar melakukan *road show*, di daerah kami disini (sekayu). Dalam kegiatannya partai golkar tidak hanya menyampaikan programprogram partai tetapi juga memberikan arahan kepada masyarakat mengenai hal wajib untuk menjadi warga negara yang baik dan menekankan kepada masyarakat tentang persatuan agar tidak terjadi perpecahan walaupun berbeda pendapat."

Tujuan utama dari kegiatan *Road Show* ini adalah dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai halhal penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menciptakan keadaan yang damai tanpa adanya persoalan.

.

⁴⁷ Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 11 November 2019

⁴⁸ Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 17 Desember 2019

2. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)



Gambar. 3. 4(Diklat DPD II Partai Golkar Muba, 2019)

Diklat merupakan bentuk upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia atau aparatur, terutama untuk meningkatan profesionalisme yang berhubungan dengan ketrampilan administrasi dan keterampilan manajemen (kepemimpinan).⁴⁹ Diklat merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan suatu program yang di rencanakan untuk dapat meningkatkan

68

⁴⁹Hidayat, Nurasyiah. (2017). Pengaruh Diklat (Pendidikan Dan Pelatihan)Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Di Bank Bpr Rokan Hulu, Vol. 6, No. 1, Hal. 72

pengetahuan, kemampuan dan pemahaman dalam bekerja. Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba sendiri mengkhususkan terhadap anggota serta kader-kader yang ada di dalamnya. Kegiatan pelatihan atau diklat ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan suatu arahan atau pemahaman terhadap visi-misi dan program —program DPD II Partai Golkar Muba itu sendiri yang berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan paham tentang bagaimana etika berpolitik dengan baik dan benar tanpa merugikan orang atau pihak lain. Sekjen Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba menyatakan bahwa:

"Kegiatan pelatihan atau diklat yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Muba memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap anggota atau kader sehingga program-program pendidikan politik DPD Partai Golkar Muba dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk mendidik anggota-anggota yang nantinya akan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap DPD Partai Golkar Muba dalam membentuk kader-kader yang lebih berkualitas dan juga memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat mengenai perilaku berpolitik yang baik." ⁵⁰

Kegiatan pelatihan dan diklat merupakan kegiatan penting bagi suatu partai, Seperti halnya yang dilakukan oleh DPD II partai golkar muba yang melakukan Diklat terhadap para kader dan anggotanya. Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba memberikan pelatihan serta diklat kepada anggota dan kader-kadernya guna terbentuknya kader dan anggota yang berkualitas. Karena keberhasilan suatu Partai Politik sangat berkaitan dengan anggota atau kader yang ada di dalamnya. Tujuan dilakukanya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada kader kader partai politik maupun masyarakat agar mampur bertingkah laku

 $^{^{50}}$ Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 11 November 2019

dan berbuat politik secara cermat, benar dan tepat kemudian didukung dengan suatu prinsip tentang keberanaran dan tentang keadilan.

Hal ini di jelaskan oleh sekjen Dewan Pimpinan Daerah II Partai golkar Muba.

"kegiatan diklat ini diadakan dengan tujuan agar kader-kader dan masyarakat mampu untuk bersikap atau berperilaku dengan baik, dan juga memberikan sikap yang baik kepada sesamanya agar tidak memunculkan kegaduhan, selain itu juga banyak isu isu yang beredar pada masyarakat agar tidak langsung mereka terima melainkan masyarakat mampu untuk menyikapinya dengan baik dengan cara mencari kebenaran tentang isu tersebut" 51

Kegiatan ini di harapkan mampu untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bagai mana cara saling mengahargai sesama warga negara dan dapat hidup rukun antar sesama warga negara yang tidak memandang ras dan keyakinan. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba yaitu tidak hanya memberikan materi melainkan juga dengan mengarahkan langsung masyarakat kepada norma-norma hukum dan juga mengajak masyarakat agar selalu hidup rukun dan saling menghormati walaupun mempunyai perbedaan pendapat dalam bentuk *Road Show* dan Diklat yang di laksanakan.

Keempat menurut Herman Giesecake yaitu Aktionswissen yaitu mampu bertingkah laku dan berbuat politik secara cermat, benar dan tepat, dan berdasarkan dengan ketetapan yang telah di buat, kemudian di dukung dengan prinsip tentang

_

⁵¹ Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 11 November 2019

kebenaran dan tentang keadilan. Sesuai dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Muba dimana partai tersebut memberikan pendidikan politik dengan materi yang telah di susun berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945. pada prinsip kebenaran dan keadilan yang dilakukan secara cermat tepat dan benar dengan tujuan mensejahterakhkan masyarakat yang didasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini di sampaikan oleh salah satu Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba.

"ketika kita melakukan pendidikan itu kita juga tidak asal-asalan ada beberapa poin penting dalam melakukannya yang tidak menyimpang dengan pancasila dan aturan-aturan hukum yang ada di indonesia intinya kita mengikuti aturan yang ada dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat agar masyarakat tidak keliru dalam memahami tentang politik⁵²"

Penyampaian materi yang dilakukan oleh DPD II partai golkar merupakan materi yang telah disusun, yaitu;

Pancasila, Kebhinekaan NKRI, dan Kesadaran Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Materi ini memiliki tujuan umum yaitu agar Peserta diklat memahami arti penting dan penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peserta diklat dapat memahami peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, peserta diklat memahami arti penting dan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peserta diklat memahami arti pentig dan nilai-nilai negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan peserta diklat agar memahami peranan dan upaya partai golkar

71

⁵² Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba 16 desember 2019

memperjuangkan mengamalkan dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai pancasila dan NKRI

Tujuan khusus dari kegiatan ini meliputi peserta mampu menjelaskan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peserta mampu memberi contoh bentuk-bentuk kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, peserta mampu menjelaskan arti penting dan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peserta mampu menjelaskan arti penting dan nilai-nilai Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan peserta diklat mampu menjelaskan peranan dan upaya partai golkar memperjuangkan, mengamalkan dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai pancasila dan NKRI

Pokok bahasan materi ini mengenai tentang pancasila sebagai ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diartikan sebagai pedoman dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi norma dasar dalam tata cara penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hokum, dasar Negara sebagai cita hukum akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Pancasila sebagai ideologidapat dikatakan efektif bekerja bila mana mampu menjadi energi yang membentuk pola laku dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkanndung. Jika nilai-nilai pancasila belum mampu berakar pada budaya dan orientasi kehidupan masyarakat, tentunya pancasila perlu direvitalisasi agar nilai-nilai dapat membumi dan dilaksanakan secara konsekwen.

2. Isu Dan Kebijakan Strategis Orientasi Fungsionaris Partai Golkar

Tujuan intruksional umum bagi peserta yaitu, untuk memahami isu-isu yang strategis bagi partai golkar dalam rangka program kerja dan pemenagan Pemilu. Bukan hanya tujuan intruksional yang timbul, melainkan adanya tujuan intruksional khusus yang membuat peserta memahami kebijakan dewan pimpinan partai golkar mengenai sikap dan posisi partai golkar terhadap sejumlah isu-isu strategis, memahami nilai dan potensi strategis suatu isu dan/atau kebijakan, dapat merencanakan pengayaan dan penajaman isu-isu strategis partai Golkar, dapat mengambarkan aspek-aspek penting perencanaan manajemen/pengelolaan isu itu sendiri dan yang terakhir dapat menjelaskan langlah-langkah perencanaan/pengelolaan isu. Pokok bahasan dari pembahasan ini meliputi makna dari isu strategis. Isu itu sendiri merupakan bentuk sosial yang menggambarkan situasi terkini yang sedang terjadi di tengah masyarakat, berupa masalah maupun fenomena yang belum terpecahkan dan berdampak kepada masyarakat. Kemudian dilakukan kegiatan analisis terhadap isu tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai isu dan akan dilakukan pengambilaan suatu kebijakan.

3. Persepsi Publik dan Prospek Pengalanggan Pemilih Dalam Pemilu 2019

Tujuan umum dari penyampaian materi ini yaitu mengharapkan peserta dapat memahami gambaran umum persepsi Publik terhadap Partai Golkar dan tujuan khususnya adalah peserta dapat mengidentifikasi penyebab dan gambaran presepsi publik terhadap Partai Golkar, peserta dapat mengidentifikasi kelompok, komunitas, lingkungan. Dan wilayah masyarakat pemilih yang menjadi peluang dan tantangan pengalangan Partai Golkar, peserta dapat mengambarkan hubungan persepsi publik dan upaya pengalangan pemilih dalam konteks pemilu serantak 2019, dan mengharapkan peserta dapat berperan aktif membangun persepsi publik yang positif terhadap Partai Golkar di wilayah penugasanya masing-masing seabagia salah satu upaya meningkatkan keterpilihan Partai Golkar pada Pemilu 2019

Pokok Pembahsan yaitu mengenai persepsi publik dan prospek penggalangan pemilih dalam Pemilu 2019: analisis hasil survei, berkaitan dalam kegiatan penggalangan pemilih dalam pemilu 2019, dinamika sosial politik, dan kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Seiring adanya transformasi kehidupan yang ada di masyarakat, serta berubahnya sistem pemilu secara umum publik menilai partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan sendiri semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan metode yang komprehensif, sistematis dan objektif dalam rangka mengeksplorasi gagasangagasan besar sebagai bagian dari rumusan trategi penggalangan pemilih.

4. Konsolidasi Organisasi (Kelembagaan)

Tujuan umum dari penyampaian materi ini agar peserta memahami kebijakan konsolidasi organisasi. Dan tujuan khususnya agar peserta dapat menjelaskan latar belakang dan tujuan kebijakan konsolidasi organisasi/kelembagaan, dapat mengidentifikasi kondisi objektif (potensi, peluang, masalah dan tantangan) konsolidasi organisasi/kelembagaan, dan dapat Menerjemahkan Langkah-langkah Strategi (*Road Map*) Konsolidasi Organisasi/Kelembagaan.

Pokok Bahasan dalam materi ini mengenai tentang, visi dan misi partai golkar (program umum hasil munaslub), tujuan partai politik dan partai golkar (AD/ART hasil munaslub), fungsi dan kewajiban partai politik menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik sebagaimana telah diunah melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tugas pokok partai golkar (AD/ART hasil Munaslub), panca sukses partai golkar (program umum hasil Munaslub), kondisi objektif konsolidasi kelembagaan partai golkar meliputi (Data konsolidasi kelembagaan, Identifikasi potensi dan peluang peluang konsolidasi kemlembagaan, Identifikasi masalah dan tantangan konsolidasi kelembagaani), dan sosialisasi hasil Munaslub 2016, hasil rapimnas II 2017, peraturan organisasi (PO), patunjuk pelaksanaan (JUKLAK), dan petujuk teknis (JUKNIS).

5. Penugasan Fungsionaris, Diklat Karakterdes/Lur, dan Konsolidasi Keangotaan

Tujuan intruksional umum dari penyampaian materi ini agar peserta memahami tugas pokok dan sistem pelaporan tugas fungsionaris. Dan tujuan Instruksional Khususnya adalah agar peserta mengerti dasar pemikiran dan tujuan penugasan fungsionaris, dapat menerjemahkan pelaksanaan tugas pokok

fungsionaris, dapat menjelaskan langkah-lankah melaksanakan pelaporan tugas fungsionaris, memahami dasar pemikiran dan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kader pengerak teritorial desa/kelurahan (diklat karakterdes/lur), serta memahami arti penting dan teknis pelaksanaan konsilidasi keanggotaan partai golongan karya.

Pokok bahasan mengenai tugas fungsionaris yang menggerakkan potensi partai Golkar untuk melaksanakan keputusan munaslub partai Golkar tahun 2017. Keputusan RAPIMNAS I partai Golkar tahun 2016, keputusan RAPIMNAS II tahun 2017 partai Golkar, serta keputusan dan kebijakan partai Golkar lainnya wilayah penugasan masing-masing, tingkatan wilayah penugasan fungsionaris, jadwal penugasan dan pelaporan tugas fungsionaris, koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas fungsionaris, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) pendidikan dan pelatihan kader pengerak teritorial desa/kelurahan (diklat karakteresdes/lur).⁵³

6. Strategi Komuniakasi Politik Dan Media Sosial

Tujuan umum dari penyampaian ini agar peserta mengerti tentang komunikasi politik yang efektif dan pemanfaatan media sosial sebagai saluran komunikasi politik kepada masyarakat. Kemudian tujuan khusus strategi komunikasi dan media sosial politik adalah peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip melakukan komunikasi politik yang baik dan efektif, memahami makna media sosial, mengerti ciri-ciri maupun jenis-jenis media sosial yang paling popular yang digunakan masyarakat, menjelaskan fungsi media sosial dalam

⁵³ Arship Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Muba 2019

dunia politik, dapat menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dan dampak negatif media sosisal bagi pelaku politik, dapat menerapkan langkah-langkah memulai kampanye politik di media sosial, serta dapat meneapkan prinsipprinsip dalam memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi politik yang efektif.

Pokok pembahasan dari materi ini meliputi tentang strategi komunikasi dan media sosial politik, yang di dalamnya berisikan pengertian, komponen, fungsi, pola komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, saluran, bentukbentuk, tahapan perncanaan, syarat komunikator yang baik serta prinsip-prinsip komunikasi politik yang efektif. Dan pengetian media sosial, ciri-ciri, elemenelemen, jenis-jenis, fungsi, dampak, dan prinsip-prinsip menggunakan media sosial yang baik dan efektif.

Pendidikan politik Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba dilaksanakan dengan mengunakan bermacam strategi yaitu setiap pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba selalu melibatkan tokoh tokoh yang sangat berpengaruh di dalam lapisan masyarakat itu, dan juga melakukan pendekatan-pendekatan melalui organisasi sayap partai agar tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik, dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

pendidikan politik yang dilakukan memiliki tujuan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan pula dapat berperan keikutsertaan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat atau dapat menjawab dari keresahan masyarakat itu. Kemudisn kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba yaitu tidak hanya memberikan materi melainkan juga dengan mengarahkan langsung masyarakat kepada norma-norma hukum dan juga mengajak masyarakat agar selalu hidup rukun dan saling menghormati walaupun mempunyai perbedaan pendapat dalam bentuk road show dan diklat yang di laksanakan, dan

Pendidikan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba berdasarkan modul yang telah direncanakan dan tidak asal-asalan dari mulai tujuan umum, tujuan khusus, kemudian pokok pembahasan materi, waktu yang digunakan untuk penyampaian materi dan narasumber yang menyampaikan telah tersusun dan terkonsep dengan tujuan agar keberhasilan dan keterlaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar.

B. Faktor Penghambat Pendidikan Politik Oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar MUBA Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

Pendidikan politik yang memiliki tugas pokok untuk dapat memberantas dari macam-macam permasalahan mengenai cara perpolitik dengan baik dan benar dan dapat mengarahkan masyarakat ke dalam kebaikan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara, hati penuh disharmoni, pertentangan dan persaingan. Dengan demikian pendidikan politik memberi arahan kepada masyarakat indonesia agar hidup damai berdampingan dan saling menghargai pendapat orang lain.

Semua upaya yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Musi Banyuasin untuk memberikan pencerahan secara politik masyarakat itu tidak luput dari kesulitan dan hambat antara lain yaitu:

1. Sebagian Masyarakat Yang Masih Memiliki Sifat Apatis

Apatisme dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap yang tidak perduli terhadap politik sehingga menyebabkan masyarakat sulit percaya dengan usaha-usaha politik yang edukatif dan juga gerakan-gerakan politik yang masih dianggap palsu dan akan mengelabuhi masyarakat saja, dengan demikian sulit untuk mengajak rakyat untuk berfikir lain dalam memajukan perkembangan daerah dengan nalar jernih.

Penjelasan diatas didukung oleh kader DPD II Partai Golkar Muba yang menyatakan

"kesulitan dalam pelaksanaan pendidikan polititk ini salah sarunya ialah masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap politik, dengan demikian kita sebagai pelaksana program pendidikan polititk ini harus bisa membarikan pengertian serta pengarahan dari awal materi seperti penjelasan tentang berpolitik, demokrasi dan lain-lain."⁵⁴

Karakteristik masyarakat yang beragam merupakan menjadi salah satu faktor dimna partai politik dituntut agar dapat memberikan arahan yang sesuai dengan karakter setiap warga negara untuk memberikan pemahaman yang sejalan dengan pemikiran masyarakat. Untuk itu partai politik harus mampu berkontribusi dengan baik dalam menyikapinya. Bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang menjadikan salah satu alasan dimana

_

⁵⁴Anggota Dewan Pimpinan Dearah Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 16 Desember 2019.

masyarakat menjadi tidak perduli kepada politik penyataan dini di dukung oleh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan sekayu.

"kita sebagai rakyat kecil tidak bisa apa-apa ketika misalkan pemerintah membuat keputusan yang merugikan rakyat seperti masalah harga-harga pangan seperti itu, kita ya nurut saja apa yag telah menjadi keputusan pemerintah kita sebagai rakyak kecil cuman bisa ikut apa kata pemerintah, maka dari itu kita ikut memilih atau ga memilih juga tidak akan mengubah nasip kita sebagai raakyat kecil, meskipun kita sudah memilih setelah kepilih mereka sudah lupa dan tidak memperdulikan rakyat kecil lagi yang intinya dia sudah menjadi anngota ataupun apalah mereka sudah lupa dengan kita rakyat kecil maka dari itu dari pada kita ikut mengurusi politik mending kita cari nafkah untuk keluarga⁵⁵"

Tidak hanya persoalan kekecewaan saja tetapi pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan itu mutlak tidak melibatkan kepentingan rakyat melainkan kepentingan pribadinya dan tanpa memperdulikan rakyat kecil, faktor inilah yang juga mendasari masyarakat tidak perduli dengan politik yang ada. Hal ini di jelaskan oleh salah satu warga Kecamatan Sekayu;

"kita mau milih juga tidak milih dalam pemilu, makan pun masih sama masih cari sendiri, kita makan tidak makan pun pemerintah tidak peduli jadi buat apa kita ikut-ikutan seperti itu(partisipasi politik)⁵⁶"

Faktor inilah yang menjadi tolak ukur penting dalam pelaksanaan pendidikan politik dimana ketika masyarakat itu tidak memiliki ketertarikan terhadap pilitik maka kemungkinan besar kegiatan pendidikan politik ini tidak akan berjalan dengan baik.

.

⁵⁵ Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 29 Februari 2020

⁵⁶ Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 29 Februari 2020

2. Biaya atau Anggaran

Dalam sebuah partai politik Anggaran Dasar (AD) adalah suatu kebijakan yang paling tinggi di dalam partai politik yang menjadikan pedoman-pedoman bagi peraturan yang ada di bawahnya untuk melakukan aktivitas politik partai. Untuk itu anggaran rumah tangga (ART) adalah aturan-aturan yang dijabaarkan lebih lanjut menyangkut isi dari anggaran dasar di dalam suatu partai politik itu.

Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba menjadikan rujukan tertinggi terhadap Anggaran Dasar sebagai terlaksananya kegiatan partai politik, sehingga Angaran Dasar memberikan pengaruh penting untuk memberi arahan tentang apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak seharusnya dilaksanakan oleh partai.

Berkaitan mengenai tentang dilakukanya pendidikan politik terutama bagi anggota atau kadernya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba tidak di jelaskan secara tegas mengenai pendidikan politik, akan tetapi dari beberapa pasal dalam anggaran dasar tersirat mengenai pelaksanaan pendidikan politik, biaya yang minim akan sangat mempengaruhi terhadap jalannya kegiatan partai politik seperti halnya pendidikan politik.

Hal ini pun di konfirmasikan oleh anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba:

"dalam melaksanakan program-program politik tidak seluruhnya di anggarkan oleh negara melainkan pengolahan dana partai itu sendiri, meskipun partai politik itu memang di biayai oleh negara, tapi dengan banyaknya kita memiliki program untuk itu tentang dana kita bisa dikatakan kurang" ⁵⁷

Anggaran merupakan hal paling penting untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan program. Karena kondisi dan situasi wilayah yang cukup jauh, partai harus menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam setiap kegiata pendidikan politik yang dilakukan anggaran adalah salah satu kunci faktor utama yang menjadi kesuksesan kegiatan tersebut dimana anggaran ini memiliki peran penting untuk terlaksanakanya kegiatan semakin banyak peserta yang di undang ataupun yang datang maka semakin banyak pula pengeluaran dana yang di butuhkan, karena dalam pelaksanaannya peserta tidak hanya datang dari daerah yang berjarak dekat dengan pelaksanaan kegiatan melainkan peserta juga ada yang berasal dari daerah-daerah sehingga tanggung jawab partai untuk mengantikan dana operasional mereka agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Hal ini dudukung oleh pernyataan dari sekertaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba

"kita juga bertangung jawab atas dana operasional mereka yang dari daerah jauh pasti tidak membutuhkan biaya yang sedikit jadi paling tidak kita tidak membebani mereka atau merugikan mereka, untuk itu dana operasional peserta pun jadi tangung jawab kita⁵⁸"

⁵⁷ Anggota Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 16 Desember 2019.

⁵⁸ Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanngal 29 Februari 2020

Tabel 3.1

Biaya Kegiatan Pendidikan Politik

Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba Tahun 2019

NO	KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK	BIAYA
1	Road Show DPD II Partai Golkar Muba	Rp., 48.085.000
	Transport Peserta 100 orang @100.000	Rp., 10.000.000
	<u>Total</u>	Rp., 58.085.000
2	Dialog Interaktif	Rp., 24.620.000
	Transport Peserta 131 orang @100.000	Rp., 13.100.000
	<u>Total</u>	Rp., 37.720.000
3	Diklat Partai Golkar Muba	Rp., 32. 766.000
	Transport Pesera 126 orang @100.000	Rp., 12.600.000
	<u>Total</u>	<u>Rp., 45.366.000</u>

Sumber: Arsip Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Muba, 2019

Berdasarkan tabel 3.1 dapat di jelaskan setiap pelaksanaan pendidikan politik yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba jumlah pengeluaranya sangat besar dan jumlah anggaran peserta di sesuaikan dengan kehadiran peserta tersebut semakin banyak peserta yang datang maka semakin banyak pula anggaran dana yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan daerah II Partai Golkar Muba.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa:

1. Pendidikan politik Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba dilaksanakan dengan mengunakan bermacam metode dan strategi-strategi yaitu setiap pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba selalu melibatkan tokoh tokoh yang sangat berpengaruh di dalam lapisan masyarakat itu, dan juga melakukan pendekatan-pendekatan melalui organisasi sayap partai agar tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik, dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pendidikan politik yang dilakukan memiliki tujuan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan dapat berperan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat atau dapat menjawab dari keresahan masyarakat itu. Kemudian kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba yaitu tidak hanya memberikan materi melainkan juga dengan mengarahkan langsung masyarakat kepada norma-norma hukum dan juga mengajak masyarakat agar selalu hidup rukun dan saling menghormati walaupun mempunyai perbedaan pendapat dalam bentuk road show dan diklat yang di laksanakan, dan pendidikan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba berdasarkan modul yang telah direncanakan dan tidak asal-asalan dari mulai

tujuan umum, tujuan khusus, kemudian pokok pembahasan materi, waktu yang digunakan untuk penyampaian materi dan narasumber yang menyampaikan telah tersusun dan terkonsep dengan tujuan agar keberhasilan dan keterlaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar.

- 2. Pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan baik, akan tetapi pelaksanaanya pun memiliki faktor kendala penghambat dalam melaksanakanya antara lain:
 - a. Sebagian masyarakat yang bersifat apatis terhadap politik yang dimana akan memiliki dampak besar bagi perpolitikan di indonesia karena masyarakat yang tidak mau ikut campur dalam pelaksanaan politik yang ada.
 - b. biaya atau anggaran. Minimnya dana atau anggaran karena banyaknya kegiatan partai merupakan faktor tidak berjalan dengan baik suatu kegiatan partai politik.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti di Dewan Pimpinan

Daerah II Partai Golkar Muba berikut saran yang dapat peneliti rekomendasikan

1. Partai Politik

a. Untuk menyusun laporan dan dokumentasi setiap kegiatan dengan baik DPD II Partai Golkar perlu mengadakan pelatihan khusus bagi para kader di tingkat DPC dan organisasi sayap partai agar mampu menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan partai yang menarik, b. Partai Golkar dalam kegiatanya harus mampu hadir di tingkat paling bawah di masyarakat tidak hanya di tigkat ranting atau desa saja, akan tetapi dapat hadir di tingkat lapisan masyarakat paling bawah sebagai upaya lebih meningkatkat kepercayaan kepada masyarakat dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddqie, Jimly, (2005). *Hukum Tatanegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Perss.
- Budhiarjdo, Miriam, (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- David, Held, (2004). Demokrasi & Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolititan, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Eko., & Puji Lestari, (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Kartono, Kartini, (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan*Orang Dewasa, Bandung: Mandar Maju
- Ladolo, Muhadam.(2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Jakarta: Rajawaji Pers.
- Sutaryo, (2004). Dasar-Dasar Sosialisasi, jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono, (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.

 Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Muri, (2019).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenedamedia Grup.

Jurnal:

Asshidiqie, Jimly, (2006). Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *JurnalKonstitusi*, volume 3 nomor 4

- Arifin Nasution. Muhmmad, (2012). Peranan Parpol Dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan, *Jurnal POLITEIA*, volume 4 nomor 1
- Budi Prayoga, Ayub, (2013). Peran Partai Politik Dalam Memberikan

 Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik, *Jurnal Politico*, volume 1 nomor. 3
- Dedi hartono dan Diananta Pramita Sari, (2018). *Aspek Perilaku Manusia*sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang terbuka publik,

 Jurnal National Academic Journal Of Architecture, Vol. 5 No. 2 Hal

 60
- Dwi Sputro, Yulianto, (2005). Peran Parti Politik Dalam Pendidikan Politik
 Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik
 Wilayah (Studi di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang
 Jawa Timur Tahun 2009 2014), *Jurnal Ketahanan Nasional*,
 volume 21 nomor 1
- Elly Noviati, Corra, (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi* volume 10 nomor 2
- Fadillah, Ichwan Nur. (2017), Pendidikan Politik Oleh Partai Nasional

 Demokrat (Nasdem) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016, *Jurnal JOM*FISIP volume 4 no 1
- Hidayat, Nurasiah. (2007), Pengaruh Diklat (Penddikan Dan Pelatihan)

 Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Di Bank BPR Rokan Hulu, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. volume. 6 nomor. 1

Kusriah, Sri, (2017). Peran Partai Politik Di Dalam Pelaksanaan Pendididkan Politik Dalam Rangka Untuk Meningkatkat Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilu Kota Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, volume 12 nomor 3

Pasaribu, Payerli, (2017). Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, *Jurnal Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma*, volume 5 nomor 1

Website:

https://mkri.id/publik/pemilu/KKPU/SK,KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR59/PL.01.1

Kpt/03/KPU/II/2018 diakses tanggal 13 September 2019

http://www.Demokrat.Co.Id/Dpc-Se-Sumatera-Selatan/ diakses tanggal 15
September 2019

http://www.mubaonline.Com diakses Tanggal 15 September 2019

http://www.Proiritas.co.id 15 September 2019

http://www.sripoku.com 16 September 2019

Https://Golkar.Or.Id/Sejarah-Partai-Golkar Diakses Tanggal25 Desember 2019.

Sumatra Selatan Https://Kompas.Com Diakses Tanggal 19 September 2019

Dokumentasi/Arsip dan Undang-Undang:

Arsip Dpd II Partai Golkar Muba, 2015-2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Dari Wawancara:

A, Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 16 Desember 2019
At, Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 16 Desember 2019
As, Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 16 Desember 2019
Azim Cik Abun, Anggota DPD II Partai Golkar Muba 16 Desember 2019
Fredi guntara, Kabid Karang Taruna Kecamatan Sekayu, Wawancara 16
Desember 2019

Ma, Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 16 Desember 2019

Ma, Masyarakat Kecamatan Sekayu, Wawancara Tanggal, 16 Desember 2019

Rusli Mahdi, Sekertaris Dpd II Partai Golkar Muba, Wawancara Tanggal 11

November 2019

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Bersama Anggota Partai Golkar Muba

- 1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Partai Golkar di Daerah Sekayu?
- 2. Program Apa Saja Yang Telah Di Laksanakan oleh Partai Golkar Muba?
- 3. Apakah Program Pendidikan Politik Yang Telah Dilaksanakan oleh Partai Golkar Muba?
- 4. Seperti Apa Pendidikan Politik Yang Telah Di Laksanakan oleh Partai Golkar Muba?
- 5. Siapa Saja Yang Menjadi Target Sasaran Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik?
- 6. Bagaimana Proses Penyampaian Pendidikan Politik Yang Dilakukan?
- 7. Bagaimana Dengan Pendanaan Atau Anggaran Yang Disiapkan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik?
- 8. Kapan Program Pendidikan Politik Dilakukan?
- 9. Bagaimana Cara Mengatasi Jika Terdapat Masyarakat Yang Tidak Sepenuhnya Menerima Program Ini?
- 10. Adakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Yang Dilakukan?
- 11. Seperti Apa Hambatan Yang Di Dapati Oleh Partai Golkar Muba?
- 12. Apa Saja Faktor Pendukung Untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Politik ini?

B. Daftar Wawancara Bersama Masyarakat

- 1. Apakah Partai Golkar Pernah Melakukan Pendidikan Politik?
- 2. Seperti Apa Pendidikan Politik Yang Dilakukan?
- 3. Apa Dampak Dari Pendidikan Politik Yang Dilakukan Partai Golkar?
- 4. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Partai Golkar?

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara

 Wawancara Dengan Anggota Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Muba



2. Wawancara Dengan Anggota Kabid Karang Taruna Kecamatan Sekayu



3. Undangan Kegiatan Road Show



4. Undangan Kegiatan Diklat



5. Undangan Kegiatan Dialog Interaktif



6. Surat Perintah Pembayaran Kwitansi/Bukti Pembayaran Kegiatan Diklat
Dpd Partai Golkar Muba



7. Surat Perintah Pembayaran Kwitansi/Bukti Pembayaran Kegiatan Road
Show



8. Surat Perintah Pembayaran Kwitansi/Bukti Pembayaran Kegiatan Dialog

Interaktif



9. Absensi/Tanda Terima Uang Transport



100 1000	ATT THE REAL PROPERTY.	TANKS YANGAN
		27.0
21 Beach (tree)	AX 38/60	6 day
to Cardwin.	32 36 60	-5~
II dia morne	97 10/60	24
15 Alphoit	36.10.00	9/9
to Street	Nº 500 SM	" Secretary
III MARKET YEARS	\$17 Feb. 200	= Comp"
3 March of	N in m	345
21 Audit	ST COUNTY	11 04
II day ligar	\$2 (mag)	31.74A
THE PROPERTY.	70 (40 00)	= m /
a Auto	20 34 56	Type-
II IN ANIAN	9.300	11 × Bate
II FEVER TO	38.56.60	1464
III Janden	10 10 10	(a)
SE SEAL HOUSE	36 50000	70 Her.
to a Rose to	25 10 90	70 70 Year
with the district	27 10 20	TO THE
Burn Ma	57 At 50	1
1 Tan 1 1/2	N7 100 000	100
dan dan	A7 (0.00)	1042
the depart	67.16.00	AV AS
DE PROPERTY SERVI	\$5 mm	of lares
Shirt Ant	(36.34.66	The Pale
Alley aga	27 10 100	503 month
	- Ger barden	aprilla-
Some Art	32,3636	mattery .
tiley stated in	32 76.99	Ladion
dies and	10 10100	14
Million Sand	30 10.00	S. State
and any year	37 16 16	- CA 1
The same	NAME OF THE PARTY	
	(2020 000	

1000	NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF	CANDO TARRAN
The same	-	1
II Sty Mile	27 (No.00)	1
II /Bre Are	P /470	0
- Der Personnell	27 15.35	0.00
to digital Statement	27 10/20	767.55
= Amort	67 70 94	E.Marie
in the James .	No consider	We
11 FA FANTON	25 18.50	THE WALL
10 70% Schools	SK SWINE	THE PAY
in Low market	35 10:00	"Maria
e de Glete	10 100.00	- Com
as the Assessed	No. of Section	or appeal?
a facili	No contra	10000
II the Year	37 (4.50.	100
sa Sachow	# (mm)	
at June April 1944	10 0000	M. Comment
to the days	No. 100.000	10-4-
at the deposit of	Al more	199
1 A4 (100-10	90 50 80	144
n Name	- 30 1000	Jan Mark
SAN NAC	30 (600)	Car Junior
N NAME AND ADDRESS OF THE PARTY	\$1 (M. HE)	11 Earling
Street Section	17.70000	TO Best
And Public IV	AF SHARE	549
a depolis tipoli	30,0000	学を
Sew die 2	10 10 10	1000
n British	50 100 000	25
N Volume	37 (40)00	- tings
N Shiel Stewart	AF 101 101	J- 140-
Species frame 2	.02 700-000	-
Day Ja	W 100.00	J-two
Ferdinal pl It	90000	11-15
al transfer of the same	Casas ta	(2)

407	2000	The same of the sa	
7		ALABOR SC MILESON	EXPERIENCE.
NI A	model.	No operate	11 Charles
11 97	and the	AT 100 MI	water f
	A FRENIALISA	27 to 100	1149
H H	at head to	37 mm	119 Table
10 N	or projected that	W town	The state
1 5	which Kerneth	47 to m.	yai.
A A	then to	39 Street,	V9 13
1 10	react in	No common la	6775
III JA	con Johns	36.500	11375
ĪΑ	year Dynes	97 (mm)	1139
1 4	Swellfook	30.50,00	196
1 10	the ferrage	NY Server	11/Jems
	E. Branch	50 Jan 80.	make.
1 10	ACC PARK	27.30-20	and the same
	elystyret .	17 30 15	11 without
12	le Mour	10 100 000	- Yelk
200	active:	20 200 200	100 Mary
	Abres	No contract	1/6
6	NAME OF THE PARTY	37.10.00	V 16 74
			1111
Ħ			340
	700		100
			204
			- 1
_			7.00
			107
			.004
			109
		-	100_
		1	100.0
		(page (100) -)	912
		1	-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIALDAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor Lampiran Perihal :B. 492 8/Un.09/VIII./TL.01/11/2019

Palembang, 7 November 2019

:1 (satu) berkas

:Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth Ketua DPD II Partai Golkar Muba Di Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Hafizd

NIM : 1657020077 Semester : VII (Tujuh) Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang

Judul Skripsi : "Pendidikan Politik Oleh DPD II Partai Golkar Pada Masyarakat

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019"

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Prof. Dr. Izomiddin, MA MP.196206201988031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: B.1532/Un.09/VIII/PP.01/10/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG:

1 Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh

Ahli sebagal dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung Jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi

Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat

3 Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n: Muhammad Hafizd, Tanggal 11 Oktober 2019

MENGINGAT:

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 407 tahun 2000
- Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
- Kep. Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Menuniuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	Sebagai	
Ainur Ropik, M.Si	197906192007101005	Pembimbing I	
Hattaa Azzuhri, M.Si	2016028804	Pembimbing II	

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masingmasing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara:

Nama	1	Muhammad Hafizd
NIM	1.	16567020077
Prodi	- 1	Ilmu Politik
Judul Skrips	3	Pendidikan Politik Oleh DPD II Partai Golkar Muda Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

Satu Tahun TMT. 22 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2020 Masa bimbingan

Kedua

Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk

merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 Oktober 2019 Dekan

- Dosen Penasehat Akademik: yang bersangkutan
- Pembinbing Skripsi (1 dan2)
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Amip







NIP. 196206201988031001

Prof. Dr. Izomiddin, MA





Tembusan:

Ketua Prodi Ilmu Politik



JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING I SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Almar Popier, M. Si

NIP

1979 0619 2007 101005

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing I untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	Muhammad tutized
NIM	16010077
Fakultas	time
Program Studi	1 ture tolitie
Judul Skripsi	Pondidiran Palite alan DPP 11 Kontai Gerar Musia Anda luasyarakat kacamatan Sarayu kasakutan lunsi baynasin tahun Dug

Demikianlah Pernyataan Kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 11, Oktober 2019

Amer Paper M.Ci

HIR: 1979 0619 2007 101005



rof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING II SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

. Hlatta Azzuliri Misi

NIPH

. 2016 60 80 09

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing II untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	Muhammad Haried
NIM	1657020077
Fakultas	tists (faxuetas lun solver du lun pontue)
Program Studi	Your politic
Judul Skripsi	Pandiduran Milite olan DPD II Rentai Galkar MIBA Pada hasyarakat kecamatan Pakayu kanupatan unusi Banyunsin Tahun 2019

Demikianlah Pernyataan Kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, " petater 2019

Hatta Azzuhri S.IP, MSg NIDN: Zo16028204



JL, Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU POLITIK PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa	- Merhannad Hafird
NIM	. 1677040077
Program Studi	. Kun Palitie
Fakultas	:FIGTP
Judul Skripsi	- Randidicar Palter olan 1000 11 Pantai Gallear MOBA
	but, Bayerafiy Lahur Dag
Pembimbing I	· Almur Ropie, M.S.
Pembimbing II	· Holfa Azzuhri, Ag. Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1		perbaicir latar becausing maraian . cecuring Poleus wahacean Lacan bentu promisa terbacice.	4
2	11 norganis	Ace Bab. I canput bat. IT. La pendimbing II.	1
3		perbaici Kal II. Tambah Lava Lapangan Sejarah, shutur Lu.	1
4	20 Dissember 2019	Acc Bas. II. languetean Bas III. but punt peneutian tan buthac Jg di perusuan sun peneutius	14-
5	2 Juani -	Perbaian BAB III Tambahcan anavisis Jani Setiap hanc wowan cara - Powerwan pash Rumuyan massican	4



JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangar Pembimbing
G	15 decurit	for BAB III langut bars IV les penhinsone II.	f.
7	16 favors	perbaici leesimpulau - Clurang touns tarbortap Pumusan masalah go dianguat - Leesimpulau Simpel Saja Jon bertele: - Savan Seturineus Leugan Leensaan	4
8	2020	Ace Bars IV breat Altonee Ik contine tapat Lajoures pada igias Kompuchensip.	A.
9	20 Jacan 2000	Ace Bas weserumnan dan dapat diajum parta Sidang skripsi	4.



JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU POLITIK PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa NIM Program Studi	- Muhammad Haried - 1657030077 - 11000 Palifix
Fakultas	- Frist P. Folilia oka DPD 11 Partai Golfar
Judul Skripsi	Muls4 lova wasyarakat kacawatan sokayu kabutatan
THE TRIAN VENEY LOS	hadi Bangaasih tahun dolg
Pembimbing I	Halla Azzahri, M.Si
Pembimbing II	: Listen and a supplement

Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
Parisi BAB I	A TOP
9 ROYLE BAB I	Short
Pariso BABI	1 AMA
ACC KOB I	1 D.
BaB #	AA
Ruxusi BaB 11	THAT STAND
Ace Bab 4 dan landet BaB III	Hus
	Pevici BAB I Pevici BAB I Pevici BAB I ACC KAB I BAB # Pevici BAB II ACC KAB I ACC KAB I ACC KAB I ACC KAB I



JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km, 3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
8	eo beraker 2019	Systemation Pauliter	9
9	6 Jaman 2020	karbutasi kab III	Sim
lo	lo dununi 2020	Consulesi Bab III	AM
le.	12 dans	Acc BaB III	after 1
b	14 dami	laught Bab Ix day	A Roy
13	15 Junes.	Kauligner Alstrak	
4	14 June	touselfosi ABfook	AND I
to	17 Jane -	konstasi Austral	
16	0000 0000	Pour son abstrak	
17	19-01-200	travisi Bab IV	And .
w	20-01-2000	ACC BAB IV	del



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari tangal 26 bulan 02 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Hafizd

Nomor Induk Mahasiswa : 1657020077 Jurusan/Program Studi : 11mu Pohitik

Judul Skripsi : Pondidikan Politik oleh DPD 11 Partai Goikor Muba Rada

Masyarakat Kecamatan Sikayu Kabupatan Musi Banguasin tahun

MEMUTUSKAN 2019

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini Rotu ... maka saudara

dinyatakan : LULUS/ TIDAK LULUS,

Indeks Prestasi Komulatif : 3.58..., oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI).Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).

2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.

 Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.

 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji:

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Ahmad Syukri. M.Si	Ketua Penguji	4-	
2	Afit Musthofa k. M. Sos	Sekretaris Penguji	Sekretaris Penguji	
3	Dr. Kun Budianso, M.si	Penguji Utama	201	
4	Remi Apriami, M.si	Penguji Kedua	1 Hayes	
5	Ainur Ropik, M.si	Pembimbing I	190.1	
6	Hatta Azzunri, m.si	Pembimbing II	1 lest	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG PADA TANGGAL : 26 -02 - 2020

Dr. Almad Syuki Misi

NIP. (977012 20010) 1014

SEKRETARIS,

AFIF Musthofa Kawwami, M.Sos

NIPH . 2027029302

KETUA



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan:

Nama

: Muhammad Hafizd

NIM

: (657020077

Jurusan

: Ilmer Politik

Judul Skripsi : Pondiolican

Politic dirk DPD 11 Partie Garger Mulon Rada wastarabat

Sorayu kosulatun kausi bayuasin tahun 2019.

Telah dimunaqasyahkan pada hari Pabu tanggal 26 bulan 02 tahun 2020

dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :...

Palembang,

Ketua,

Dr. Ahmad Syukei, M.Si

NIP. MY7052 Zootul loug

Tembusan:

- 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip.

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Muhamanad Hafizd

NIM : 1657020077

Program Studi : Ilmu Politik

Tanggal Ujian Munaqosah : 26 Februari 2020

JudulSkripsi : Pendidikan Politik Oleh Dewan Pimpinan Daerah II Batai

Golkar Muka Pada Masyarakat Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyalasin Tahun 2019

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH danTELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Kun Budianto, M.Si	Penguji I	f
2	Reni Apriani, M.Si	Penguji II	Real Jan.

Palembang, 6 Maret 2020

Menyetujui,

Ainur Rapik, M.& Dosen Pembimbing I

Hatta Azzuhri, M. Si

Dosen Pembimbing II